43013.pdf

BY ND NC

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG

UNIVERSITAS TERBUKA

TAPM Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi Bidang Minat Administrasi Publik

Disusun Oleh :

PARAMITA ADHINUL PUTERA

NIM. 500581996

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS TERBUKA
JAKARTA
2016

43013.pdf

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PACSASARJANA
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung** adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.
Apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Tarakan, November 2016
Yang Menyatakan

METERAI TEMPEL
D6A89AEF1178346B2
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Paramita Adhinul Putera
NIM . 500581996

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung

Paramita Adhinul Putera
(Email : xtrasesingon369@gmail.com)
Program Pascasarjana Universitas Terbuka

Abstrak

Potensi timbulan sampah di Kecamatan Sesayap merupakan konsekuensi dari pertumbuhan penduduk serta pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat. Peningkatan jumlah volume sampah di Kecamatan Sesayap tentu harus diimbangi dengan kebijakan pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik secara integratif, termasuk kepada dampak yang mungkin ditimbulkan Mengingat begitu pentingnya pengelolaan sampah, maka perlu adanya peran pemerintah daerah untuk melahirkan kebijakan pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Penelitian ini berjudul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Didasarkan adanya permasalahan mengenai pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap yang belum berjalan secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung berdasarkan teori Charles O. Jones tentang tiga pilar utama implementasi kebijakan yaitu : organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yag dikaji di dalam penelitian ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Sedangkan data-data yang diperlukan diperoleh melalui teknik wawancara, teknik observasi, serta teknik dokumentasi.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa pada umumnya sudah berfungsi dan direalisasikan, kendati hasilnya belum sepenuhnya efektif. Pada aspek **organisasi,** Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung harus segera menyusun dan penetapan standar pelaksanaan kegiatan pengelolaan sampah. Disamping itu, Dinas PU dan Perhubungan sebagai pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap juga harus meningkatkan koordinasi antar lembaga yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. Pada aspek **interpretasi,** Dinas PU dan Perhubungan perlu mensosialisasikan program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Pemberian insentif/gaji kepada petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian khusus. Pada aspek **aplikasi,** Dinas PU dan Perhubungan perlu segera membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai dengan standar kriteria menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah.

Kata kunci : implementasi, kebijakan, organisasi, interpretasi, aplikasi.

The Implementation of Waste Management Policy in the Sesayap District of Tana Tidung

Paramita Adhinul Putra
(Email: xtrasesingon369@gmail.com)
Universitas Terbuka Program Pascasarjana

Abstract

Potential of waste in the Sesayap District is a consequence of increasing population and growing economy . The increased volume of waste in the Sesayap District should be congruous with by a well-organized and integrative waste management policy manner, including its potential impacts. Because of the importance of waste management, both the central and local governments need to produce a good and right policy of waste management.

This study aims to investigate to what extent has been the implementation of Waste Management Policy in the esayap Tana Tidung District based on the the three main pillars of the policy implementation, namely *organization*, *interpretation*, and *application*.

This study adopted a qualitative research method. Since this study required a number of field data that is actual and conceptual, the data were collected through in-depth interview, observation and documentation techniques.

The research findings show that in general the problems have been properly managed and also adequately realized, even though the results are not yet fully effective. In terms of organization, the Local Government of Tana Tidung must immediately prepare and set standards implementation of waste management activities. In addition, the Department of Public Works and Transportation, as executor of the implementation of waste management policy in the Sesayap district should also increase coordination among relevant institutions dealing with waste management in the Sesayap district. As to the aspect of interpretation, the Department of Public Works and Transportation also need to socialize the good and true of waste management programs to the local community. Special attention also needs to be paid to field officers by giving incentives, or salaries. In the aspect of the application, the Department of Public Works and Transportation should immediately establish Landfill (TPA) that complies with the criteria according to Law No. 18 of 2008 on Waste Management.

Keywords: implementation, policy, organization, interpretation, application.

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR LAYAK UJI

Yang bertandatangan di bawah ini, saya selaku Pembimbing TAPM dari Mahasiswa :

Nama/NIM : PARAMITA ADHINUL PUTERA/500581996
Judul TAPM : IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa TAPM dari mahasiswa yang bersangkutan sudah/baru selesai sekitar 85 % sehingga dinyatakan sudah layak uji/belum layak uji dalam Ujian Sidang Tugas Akhir Program Magister (TAPM).

Demikian keterangan ini dibuat untuk menjadikan periksa.

Tarakan, Juni 2016

Pembimbing II	Pembimbing I
Prof. Dr. Karnedi, S.S. MA	Dr. H. Entang Adhy Muhtar, MS
NIP. 19640508 199903 1 002	NIP. 19580504 198601 1 001

LEMBAR PERSETUJUAN TAPM

Judul TAPM	:	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG
Penyusun TAPM	:	Paramita Adhinul Putera
NIM	:	500581996
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Hari/Tanggal	:	Jum'at / 9 Desember 2016

Menyetujui :

Pembimbing II

Prof. Dr. Karnedi, S.S. MA
NIP. 19640508 199903 1 002

Pembimbing I

Dr. H. Entang Adhy Muhtar, MS
NIP. 19580504 198601 1 001

Penguji Ahli

Prof. Dr. Budiman Rusli, MS
NIP. 19600509 198603 1 006

Mengetahui,

Ketua Bidang Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Magister,

Dr. Darmanto, M.Ed
NIP. 19591027 198603 1 003

Direktur Program Pascasarjana,

Suciati, M. Sc. Ph.D
NIP. 19520213 198503 2 001

UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK

LEMBAR PENGESAHAN

Nama	:	Paramita Adhinul Putera
NIM	:	500581996
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Judul TAPM	:	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KECAMATAN SESAYAP KABUPATEN TANA TIDUNG

Telah dipertahankan dihadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Program Studi Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :

Hari/Tanggal	:	Jum'at / 9 Desember 2016
Waktu	:	15:00 s/d 16:00 Wita

Dan telah dinyatakan **LULUS**

PANITIA PENGUJI TAPM

Ketua Komisi Penguji

Nama : Dr. Sofjan Aripin, M.Si .....

Penguji Ahli

Nama : Prof. Dr. Budiman Rusli, MS .....

Pembimbing I

Nama : Dr. H. Entang Adhy Muhtar, MS .....

Pembimbing II

Nama : Prof. Dr. Karnedi, S.S. MA .....

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayah hingga penulis dapat merampungkan penyusunan Tugas Akhir Program Magister (TAPM) dengan judul "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung".

Penulis tertarik dengan permasalahan ini karena pelayanan publik selama ini diakui masih belum memuaskan dalam segala dimensi kualitas pelayanan yang dilakukan oleh petugas birokrasi pemerintah, hal ini banyak diutarakan oleh para pakar maupun teori-teori yang berhubungan dengan pelayanan publik. Oleh karena itu penulis berharap tulisan ini dapat memberikan masukan terhadap instansi pemerintah yang melaksanakan pelayanan publik khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung.

Penulis menyadari tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, mustahil penyusunan TAPM ini dapat berjalan dengan baik. Penulis telah banyak menerima bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, baik moril maupun materil. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Direktur Program Pascasarjana Universitas Terbuka.
2. Kepala UPBJJ-UT Samarinda dan Tarakan

3. Bapak Dr. H. Entang Adhy Muhtar, MS (Pembimbing I) dan Bapak Prof. Dr. Karnedi, MA (Pembimbing II) yang selalu membimbing dengan setia dan tak pernah bosan memberikan saran dan masukan demi penyempurnaan penulisan TAPM ini.
4. Almarhum Ayahanda (H. Ramsyah) dan Ibunda (Hj. Maimunah, S. Pd) yang selalu mendoakan dan mengharapkan penulis dapat sekolah setinggi-tingginya, walaupun dengan segala keterbatasan dan hambatan yang dihadapi. Terima kasih untuk doa dan kasih dan sayang tanpa pamrih yang telah dicurahkan untuk penulis selama ini.
5. Istriku tersayang (Widiastuti, A. Md. Keb) yang banyak mendoakan dan memberikan semangat, serta buah hatiku Muhammad Khalid Elkahfy Ramadhan, semoga ini menjadi motivasi kalian juga untuk menuntut ilmu setinggi mungkin demi menyongsong masa depan yang lebih baik.
6. Bapak Bupati Tana Tidung (Dr. H. Undunsyah, M.Si. MH) yang telah menerbitkan Surat Ijin Belajar kepada penulis bersama rekan-rekan Aparatur Sipil Negara pada lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung guna menempuh Program Pendidikan Magister pada Universitas Terbuka.
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung beserta seluruh staf yang telah banyak membantu memberikan informasi baik lisan maupun berupa dokumen-dokumen yang penulis butuhkan selama ini

43013.pdf

untuk mendukung penulisan TAPM ini.

8. Kepada para informan dan seluruh pihak yang telah memberikan informasi dan data sehingga penyusunan TAPM ini dapat siselesaikan pada waktunya.

Akhirnya semoga semua bantuan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Penulis menyadari bahwa TAPM ini masih membutuhkan penyempurnaan, untuk itu diharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak untuk penyempurnaan ini.

Semoga TAPM ini bermanfaat bagi kita semua dan kiranya dapat memberikan kontribusi akademik maupun prakteknya dalam pelayanan publik.

Tideng Pale, 9 November 2016

Paramita Adhinul Putera

RIWAYAT HIDUP

Nama	:	Paramita Adhinul Putera
NIM	:	500581996
Program Studi	:	Magister Administrasi Publik
Tempat /Tanggal Lahir	:	Tideng Pale/2 Mei 1986
Riwayat Pendidikan	:	Lulus SD di SDN 003 Sesayap pada tahun 1997 Lulus SMP di SMPN 1 Sesayap pada tahun 2000 Lulus SMA di SMAN Sesayap pada tahun 2004 Lulus S1 di STIEKN Jayanegara Malang pada tahun 2010
Riwayat Pekerjaan	:	Tahun 2011 s/d sekarang sebagai Internal Auditor di Inspektorat Kabupaten Tana Tidung.

Tideng Pale, 9 November 2016

Paramita Adhinul Putera
NIM. 500581996

DAFTAR ISI

Halaman

Abstrak i
Abstract ii
Lembar Layak Uji iii
Lembar Persetujuan iv
Lembar Pengesahan v
Kata Pengantar vi
Riwayat Hidup ix
Daftar Isi x
Daftar Gambar xii
Daftar Tabel xiii
Daftar Lampiran xiv

BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Perumusan Masalah 11
C. Tujuan Penelitian 12
D. Kegunaan Penelitian 13

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 14
A. Kajian Teori 14
1. Kebijakan Publik 14
2. Implementasi Kebijakan 18
3. Model Implementasi Kebijakan 31
4. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan 38
5. Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 42
B. Penelitian Terdahulu Yang Relevan 44
C. Kerangka Berfikir 48
D. Operasionalisasi Konsep 48

BAB III METODE PENELITIAN 51
A. Desain Penelitian 51
B. Fokus Penelitian 53
C. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan 54
D. Instrumen Penelitian 55
E. Prosedur Penelitian 57
F. Metode Analisis Data 58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 61
A. Deskripsi Objek Penelitian 61
1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung 61
2. Visi dan Misi Kabupaten Tana Tidung 61
3. Struktur Organisasi, Kedudukan dan Tupoksi Dinas PU dan Perhubungan 69

B. Hasil Dan Pembahasan 71
1. Aspek Organisasi 77
2. Aspek Interpretasi 86
3. Aspek Aplikasi 97

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 114
A. Kesimpulan 114
B. Saran 115

DAFTAR PUSTAKA 116

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 : Pedoman Dan Hasil Wawancara 120
Lampiran 2 : Foto-foto 129
Lampiran 3 : Contoh Model SOP Pengelolaan Sampah 135

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Implementation as a Political and Administrative Process..... 33
Gambar 2.2 Model Linier Implementasi Kebijakan 33
Gambar 2.3 Model Interaktif Implementasi Kebijakan 34
Gambar 2.4 model kesesuaian 37
Gambar 2.5 Kerangka Berfikir Penelitian 48

43013.pdf

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Tana Tidung 2
Tabel 4.1 PembagianWilayah Administrasi Kabupaten Tana Tidung..... 64
Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Masing-Masing Kecamatan Berdasarkan Jenis Kelamin 67
Tabel 4.3 Nilai Pagu Anggaran Untuk Masing-Masing Program Kerja Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan..... 87
Tabel 4.4 Pembagian Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan..... 92

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Dan Hasil Wawancara 120
Lampiran 2 Foto-foto 129
Lampiran 3 Contoh Model SOP Pengelolaan Sampah 135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kabupaten Tana Tidung adalah kabupaten termuda di Kalimantan Utara. Sesuai dengan Undang--Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Tana Tidung yang kemudian disahkan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 10 Juli 2007. Kabupaten Tana Tidung memiliki luas wilayah administrasi seluas 4.828,58 km2, atau 35,63 dari wilayah Kabupaten induknya (Kabupaten Bulungan). Kabupaten Tana Tidung merupakan bagian dari wilayah Propinsi Kalimantan Utara. Wilayah administratif Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 Kecamatan dan 33 Desa, yaitu Kecamatan Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir, Kecamatan Tana Lia, Kecamatan Betayau, dan Kecamatan Muruk Rian. Melalui peta padu serasi Provinsi Kalimantan Timur, dengan batas-batas wilayah Sebelah Utara Kabupaten Nunukan, Sebelah Timur Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan dan Kota Tarakan, Sebelah Selatan Kabupaten Bulungan, Sebelah Barat Kabupaten Malinau.

Sejak diresmikan tahun 2007, Kabupaten Tana Tidung tumbuh dan berkembang menjadi wilayah yang semakin ramai dimana setiap harinya selalu diwarnai dengan berbagai aktivitas warganya. Kabupaten Tana Tidung memiliki jumlah penduduk yang semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Pertambahan tersebut tidak hanya disebabkan faktor alami pertumbuhan penduduk yakni kelahiran dan kematian tetapi juga faktor lain yang tidak kalah

pentingnya yakni migrasi. Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung pada tahun 2015 sebanyak 24.002 jiwa. Pusat kegiatan pemerintahan dan pusat perekonomian Kabupaten Tana Tidung terletak di Kecamatan Sesayap. Makin hari jumlah penduduk di daerah tersebut semakin meningkat dan daerah ini mulai berkembang menjadi pusat pertumbuhan di Kabupaten Tana Tidung. Jumlah penduduk Kecamatan Sesayap pada tahun 2015 sebanyak 10.566 jiwa.

Tabel 1.1
Jumlah penduduk Kabupaten Tana Tidung tahun 2015

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laik-Laki	Perempuan	
1.	Sesayap	5.649	4.917	10.566
2.	Sesayap Hilir	3.328	2.883	6.211
3.	Tana Lia	1.768	1.456	3.224
4.	Betayau	1.357	1.223	2.580
5.	Muruk Rian	743	678	1.421
Jumlah		12.845	11.157	24.002

Sumber : Disdukcapil KTT Tahun 2015

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat. pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan di wilayah tersebut. Salah satu permasalahan yang biasa timbul di wilayah tersebut adalah masalah sampah. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Sampah adalah sosial, ekonomi, dan pengaturan tata ruang. Hal-hal negatif yang bisa diakibatkan oleh sampah adalah (1) Secara umum sampah bisa mempengaruhi kesehatan masyarakat sekitar. karena untuk jenis sampah tertentu bisa menimbulkan sumber penyakit. (2) Sampah bisa menurunkan keindahan atau nilai estetika suatu wilayah. diakibatkan penanganan sampah yang buruk. (3) Sampah bisa menyebabkan polusi udara dan bau busuk yang menyengat. (4)

Sampah bisa menyebabkan bahaya banjir pada musim penghujan. dimana sampah yang tidak terangkut dapat menjadi penyumbat saluran-saluran air.

Penanganan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung secara formal dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung melalui Bidang Tata Ruang. Kebersihan dan Pertamanan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung yang mana salah satu tugas pokoknya adalah melaksanakan kebijakan umum dan teknis di bidang kebersihan dan pertamanan.

Berdasarkan informasi awal yang diperoleh, volume sampah yang dihasilkan di wilayah Kecamatan Sesayap pada tahun 2015 berdasarkan perkiraan dapat mencapai 12.500 kg per hari, sementara kemampuan dan daya angkut hanya berkisar antara 9000 kg sampai dengan 10.000 kg per hari (lebih kurang 80%) sehingga perlu didukung dengan sistem pengelolaan sampah yang memadai. Pelaksanaan pengelolaan sampah sangat dipengaruhi komponen-komponen yang mendukung yaitu aspek teknis, kelembagaan, hukum atau peraturan, pembiayaan, maupun peran serta masyarakat (Kodoatie. 2003:217).

Menangani sampah memang persoalan yang tidak mudah hal ini dikarenakan semakin meningkatnya jumlah penduduk pasti selalu diimbangi dengan semakin tingginya tingkat konsumsi masyarakat dan berimplikasi pada produksi sampah.. Kondisi tersebut tidak sebanding dengan ketersediaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) untuk menampungnya, sumber daya manusia yang

menangani kebersihan, terbatasnya fasilitas pendukung pengelolaan sampah, serta konsep pengelolaan sampah yang masih konvensional, hingga sampai kepada masalah sosial yang ditimbulkan dari sampah (seperti bau yang menyengat akibat tumpukan sampah, sampah rumah tangga dibuang ke sungai, terganggunya kesehatan, serta rendahnya keaktifan masyarakat untuk mematuhi ketentuan pembuangan sampah).

Bertambahnya penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang dihasilkan. Sampah telah menjadi permasalahan nasional sehingga pengelolaannya perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir. Pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab, dan kewenangan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, serta peran masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara profesional, efektif, dan efisien.

Pengelolaan sampah merupakan bagian dari pengelolaan kebersihan. Pengertian bersih sebenarnya bukan hanya berarti tidak adanya sampah. melainkan juga mengandung pengertian yang mengarah ke tinjauan estetika. Terdapat tiga hal yang menjadi perhatian utama dan yang harus dipertimbangkan secara matang dalam pengelolaan sampah yaitu : identifikasi kondisi sistem pengelolaan sampah yang telah ada, definisi baik dan benar dalam hal pengelolaan sampah, dan pola kebijaksanaan pembinaan dan pengembangan (http:// www.docstoc.com).

Berbagai upaya dilakukan untuk menangani pengelolaan sampah namun upaya tersebut kerap mengalami kendala. Salah satu yang menimbulkan masalah pengelolaan sampah adalah besarnya biaya untuk menangani pengelolaan sampah mulai dari pengumpulan, pengangkutan, sampai dengan pembuangan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Biaya ini semakin lama semakin meningkat sejalan dengan bertambahnya jumlah penduduk. Dengan bertambahnya penduduk maka produksi sampah juga meningkat, oleh karena itu efektivitas pengolahan sampah harus ditingkatkan.

Pengelolaan sampah adalah semua kegiatan yang dilakukan untuk menangani sampah sejak ditimbulkan sampai dengan pembuangan akhir. Secara garis besar kegiatan pengelolaan sampah meliputi : pengendalian timbulan sampah, pengumpulan sampah, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir (Sejati. 2009). Penanganan sampah tidaklah mudah karena sangat kompleks, mencakup aspek teknis, ekonomi, dan sosiopolitis. Terdapat lima aspek manajemen dalam pengelolaan sampah yaitu :

1. Aspek kelembagaan yang menggerakkan, mengaktifkan, dan mengarahkan sistem;
2. Aspek pembiayaan yang merupakan komponen sumber dalam arti supaya sistem mempunyai kinerja yang baik;
3. Aspek pengaturan (dasar hukum). Berupa komponen yang menjaga pola atau dinamika sistem agar dapat mencapai sasaran secara efektif;

4. Aspek peran serta masyarakat adalah komponen yang tidak bersifat subsistem tetapi terikat erat sebagai penyediaan kapasitas kerja maupun pendanaan;
5. Aspek teknik operasional merupakan komponen yang paling dekat dengan objek pengelolaan sampah. Terdiri dari sarana, prasarana, perencanaan, dan tata cara teknik operasional pengelolaan sampah untuk kegiatan : pewadahan, pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir (Sejati. 2009).

Salah satu pilar pelaksanaan tata kepemerintahan yang baik (*good governance*) adalah komitmen pada lingkungan hidup yang berarti diperlukan penanganan pengelolaan sampah yang tetap berasaskan pada kelestarian lingkungan hidup, serta dampak negatif yang ditimbulkannya terhadap lingkungan hidup diupayakan seminimal mungkin. Pemerintah Daerah sebenarnya telah berupaya untuk melakukan pengelolaan sampah di wilayahnya melalui instansi pelaksana di bidang kebersihan namun pengelolaan tersebut masih menggunakan cara-cara yang konvensional serta dilaksanakan tanpa melakukan integrasi pengelolaan yang komprehensif.

Di dalam *governance* terdapat tiga komponen atau pilar yang terlibat. Pertama, *public governance* yang merujuk pada lembaga pemerintahan, sehingga dapat diartikan sebagai tata kepemerintahan yang baik di lembaga-lembaga pemerintahan. Kedua, *corporate governance* yang merujuk pada dunia usaha swasta, sehingga dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. Ketiga, *civil society* atau masyarakat luas. Jika dikaitkan dengan kepedulian terhadap

lingkungan, maka ketiga komponen tersebut haruslah memiliki pola pikir yang sama terhadap pengelolaannya yang efektif. Pemerintah bersama segenap jajaran aparatnya haruslah menunjukkan contoh tauladan terhadap penanganan sampah di lingkungannya, dimulai dengan membuang sampah pada tempatnya dan menjaga kebersihan kantor. Tentunya sebagai komponen penting dalam kerangka *good governance,* peran swasta serta masyarakat umum perlu secara sinergi berjalan bersama dalam mewujudkan tata kelola sampah yang baik (*good garbage management*), proporsional, efektif, dan efisien. (Sari dan Rustan, 2009)

Jalan keluar terhadap pengelolaan sampah yang baik dilakukan secara garis besar melalui pengelolaan sampah yang terorganisir dengan baik secara integratif mulai dari hulu hingga hilir termasuk kepada dampak yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya adalah mengoptimalkan peran penting sektor swasta dalam penanganan sampah yang salah satunya dapat dikembangkan melalui konsep kemitraan bersama. Disamping hal tersebut juga perlu dibuatkan aturan hukum yang tegas menguraikan hak dan kewajiban seluruh komponen yang terlibat dalam pengelolaan sampah, dan mendorong peran serta masyarakat untuk berperilaku serta mensukseskan pengelolaan sampah yang lebih optimal

Undang--Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah telah mendefinisikan sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dan atau proses alam yang berbentuk padat. Adapun secara umum. sampah berdasarkan sifatnya dibagi atas 2 (dua) bagian besar yaitu:

1. Sampah Anorganik, sampah ini berasal dari sumber daya alam tak terbarui seperti mineral dan minyak bumi, atau dari proses industri.

Sebagian zat anorganik secara keseluruhan tidak dapat diuraikan oleh alam, sedang sebagian lainnya hanya dapat diuraikan melalui proses yang cukup lama;

2. Sampah Organik, yaitu sampah yang terdiri dari bahan-bahan penyusun tumbuhan dan hewan yang berasal dari alam atau dihasilkan dari kegiatan pertanian, perikanan, rumah tangga, atau yang lain. Sampah ini dengan mudah diuraikan dalam proses alami. Termasuk sampah organik misalnya sampah dari dapur, sisa tepung, sayuran, kulit buah, dan daun.

Saat ini volume sampah yang timbul di Kabupaten Tana Tidung terus meningkat. Sampah-sampah tersebut berasal dari pasar, fasisilitas umum dan pemukiman, maupun perkantoran. Jauhnya lokasi pembuangan akhir (TPA) dan keterbatasan sarana berupa bak penampungan sampah sementara menyebabkan penumpukan sampah. Sangat perlu dicarikan solusi untuk mengatasi permasalahan di atas. Pemerintah (Instansi terkait) diharapkan mampu membawa masyarakat melakukan pengelolaan sampah yang baik dan benar, dan mencari cara yang tepat untuk membatasi meningkatnya produksi sampah, khususnya sampah rumah tangga.

Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (selanjutnya disebut Undang-Undang Sampah), untuk pertama kalinya terdapat landasan legal bagi pengelolaan sampah di Indonesia. Undang-Undang tersebut mengatur tentang kewajiban semua orang untuk ikut dalam pengelolaan sampah dan kewajiban pengelola sampah, baik itu

pemerintah atau pihak-pihak lain. Bagi Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, Undang-Undang Sampah merupakan salah satu payung hukum yang kuat dalam pengelolaan sampah. Implementasi Undang-Undang tersebut membutuhkan komitmen yang kuat juga dukungan dari seluruh stakeholder di Kabupaten Tana Tidung. Tetapi sampai sekarang hasilnya masih belum memuaskan.

Lebih jauh dijelaskan bahwa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yang mengatur tentang tugas dan wewenang Pemerintah Kabupaten atau Kota dalam pengelolaan sampah. Untuk melaksanakan Undang-Undang tersebut. maka dikeluarkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Peraturan Pemerintah tersebut berfungsi untuk melindungi masyarakat dari segala bentuk dampak negatif yang diakibatkan kelalaian dalam pengelolaan sampah.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung mencakup berbagai aspek sebagai berikut :

1. Belum adanya lembaga pemerintah atau SKPD tersendiri yang secara khusus menangani masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung;
2. Penanganan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung yang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung melalui Seksi Kebersihan dan Pertamanan Bidang Tata Ruang. Kebersihan dan Pertamanan, dapat menimbulkan

potensi *conflict of interest* mengingat para pegawai bidang ini juga harus melaksanakan program kerja ke-PU-an;

3. Penegakkan aturan masih lemah karena Perda atau perangkat aturan lainnya (SOP, Juklak, Juknis) yang secara tegas mewajibkan pengelolaan persampahan pada seluruh pihak di Kabupaten Tana Tidung belum ada;
4. Belum semua wilayah di Kecamatan Sesayap dapat dilayani oleh Bidang Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan Dinas PU Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. Dari 7 desa yang ada di wilayah Kecamatan Sesayap. yang belum terlayani sebanyak 1 desa;
5. Belum maksimalnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Masih banyaknya anggota masyarakat membuang sampah di lingkungan pemukiman maupun di sungai/saluran. Hal tersebut dikarenakan kurangnya TPS yang dibagikan terutama bagi wilayah yang letaknya berjauhan dengan pusat pemerintahan Kecamatan Sesayap;
6. Tidak semua ruas jalan raya disapu setiap hari. Hal ini disebabkan jumlah personel yang ditugaskan untuk membersihkan jalanan tidak sebanding dengan jumlah ruas jalan yang perlu dibersihkan;
7. Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang tidak memadai. TPA yang ada hanya berupa lahan kosong sebagai penampungan akhir dari sampah-sampah yang diangkut melalui TPS tanpa adanya proses yang lebih lanjut. Disamping itu, proses pengelolaan akhir sampah yang masih

menggunakan metode *open dumping* sudah tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang yang mewajibkan setiap kabupaten/kota untuk menggunakan metode *santary landfill* dalam proses pengelolaan akhir sampah;

8. Keterbatasan sumber daya manusia pengelola sampah di Kabupaten Tana Tidung baik secara kualitas maupun kuantitas. Banyak pengambil sampah merupakan tanaga kontrak. Hal ini sangat mempengaruhi kinerja mereka dalam pengambilan sampah karena pendapatan mereka kecil, hanya sesuai upah minimum regional. Dari 92 orang tenaga kontrak yang dipekerjakan, 36 orang diantaranya bertugas sebagai pengangkut dan pengambil sampah.

Berdasarkan paparan di atas, pengelolaan sampah merupakan hal yang patut menjadi perhatian. Oleh karena itu, maka dirasa perlu untuk melakukan evaluasi terhadap implemetasi kebijakan pengelolaan sampah pada praktiknya di masyarakat Kabupaten Tana Tidung khususnya di Kecamatan Sesayap.

Melihat hal tersebut peneliti ingin mengkaji mengenai implementasi kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pengelolaan sampah. Untuk itu peneliti bermaksud melakukan penelitian mengenai "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung".

B. Perumusan Masalah

Dari uraian mengenai latar belakang masalah, peneliti merumuskan tiga pertanyaan penelitian *(research question)* terkait implementasi kebijakan

pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:yaitu ditinjau dari :

1. Bagaimana aspek organisasi pengelola sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung?
2. Sejauhmana kebijakan tentang pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung ditafsirkan?
3. Sejauhmana operasionalisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung?;

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah terkait efektifitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap tersebut di atas, maka dirumuskan tiga tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Untuk mengidentifikasi aspek organisasi pengelola sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
2. Untuk mengkaji penafsiran terhadap kebijakan pengelola sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung;
3. Untuk mengkaji operasionalisasi dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.

D. Kegunaan Penelitian

1. Manfaat Teoretis.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu Administrasi Publik, khususnya mengenai aspek-aspek kebijakan publik.

Diharapkan temuan-temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan publik terutama kebijakan pengelolaan sampah.

2. Maafaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran atau pemikiran, serta upaya-upaya yang harus ditempuh dan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung dalam memaksimalkan implementasi kebijakan pengelolaan sampah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoretis

1. Kebijakan Publik

Kebijakan publik secara sederhana adalah konsep dasar rencana pemerintah atau organisasi publik untuk mengatur kepentingan umum atau orang banyak. Sedangkan secara umum, pengertian kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan oleh pemerintah untuk kepentingan umum. Segala sesuatu yang dimaksud adalah setiap aturan dalam kehidupan bersama, baik itu hubungan antarwarga maupun warga dengan pemerintah.

Kebijakan publik biasanya dituangkan dalam peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang (UU), Peraturan Presiden, dan Peraturan Daerah (Perda) merupakan bentuk-bentuk kebijakan publik. Kebijakan publik atau kebijakan umum merupakan program-program yang diterapkan oleh pemerintah dalam arti luas untuk mencapai tujuan masyarakat. Dengan kata lain, kebijakan publik adalah suatu keputusan-keputusan dari lembaga yang berwenang atau pemerintah yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Seperti kebijakan tentang tarif dasar listrik (TDL), tarif telepon, harga BBM, tarif bus kota dan lain sebagainya.

Dari berbagai kepustakaan dapat diungkapkan bahwa kebijakan publik dalam kepustakaan internasional disebut sebagai *public policy*, yaitu suatu aturan yang mengatur kehidupan bersama yang harus ditaati dan berlaku mengikat

seluruh warganya. Setiap pelanggaran akan diberi sanksi sesuai dengan bobot pelanggarannya yang dilakukan dan sanksi dijatuhkan didepan masyarakat oleh lembaga yang mempunyai tugas menjatuhkan sanksi (Nugroho, 2004: 1-7).

Aturan atau peraturan tersebut secara sederhana kita pahami sebagai kebijakan publik, jadi kebijakan publik ini dapat kita artikan suatu hukum. Akan tetapi tidak hanya sekedar hukum namun kita harus memahaminya secara utuh dan benar. Ketika suatu isu yang menyangkut kepentingan bersama dipandang perlu untuk diatur maka formulasi isu tersebut menjadi kebijakan publik yang harus dilakukan dan disusun serta disepakati oleh para pejabat yang berwenang. Ketika kebijakan publik tersebut ditetapkan menjadi suatu kebijakan publik; apakah menjadi Undang-Undang, apakah menjadi Peraturan Pemerintah atau Peraturan Presiden termasuk Peraturan Daerah maka kebijakan publik tersebut berubah menjadi hukum yang harus ditaati.

Sementara itu pakar kebijakan publik mendefinisikan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dikerjakan atau tidak dikerjakan oleh pemerintah, mengapa suatu kebijakan harus dilakukan dan apakah manfaat bagi kehidupan bersama harus menjadi pertimbangan yang holistik agar kebijakan tersebut mengandung manfaat yang besar bagi warganya dan berdampak kecil dan sebaiknya tidak menimbulkan persoalan yang merugikan, walaupun demikian pasti ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, disinilah letaknya pemerintah harus bijaksana dalam menetapkan suatu kebijakan (Dye, 1992:2-4).

Kebijakan secara seperti yang dikutip oleh Said Zainal Abidin (2004:31-33) dapat dibedakan dalam tiga tingkatan:

1. **Kebijakan umum,** yaitu kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan.
2. **Kebijakan pelaksanaan** adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang.
3. **Kebijakan teknis,** kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan.

Kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Namun menurut Riant Nugroho D (2004, bukan berarti kebijakan publik mudah dibuat, mudah dilaksanakan, dan mudah dikendalikan, karena kebijakan publik menyangkut politik (Nugroho, 2004:52).

Kebijakan publik dalam praktik pada dasarnya terbagi dalam tiga prinsip yaitu: **pertama,** dalam konteks bagaimana merumuskan kebijakan publik (Formulasi kebijakan); **kedua,** bagaimana kebijakan publik tersebut diimplementasikan dan **ketiga,** bagaimana kebijakan publik tersebut dievaluasi (Nugroho, 2004:100-105)

Dalam konteks formulasi, maka berbagai isu yang banyak beredar didalam masyarakat tidak semua dapat masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki latar

belakang yang kuat berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan enam pertimbangan sebagai berikut:

1. Apakah Isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan?.
2. Apakah Isu tersebut sensitif, yang cepat menarik perhatian masyarakat?
3. Apakah Isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat?
4. Apakah Isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga mempunyai dampak yang luas dalam masyarakat kalau diabaikan?
5. Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi?
6. Apakah Isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat?

Namun dari semua isu tersebut di atas menurut Abidin (2004:56-59) tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Berikut ini kriteria yang dapat digunakan dalam menentukan salah satu di antara berbagai kebijakan:

1. Efektifitas – mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan.
2. Efisien – dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai.
3. Cukup – suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumberdaya yang ada.
4. Adil

5. Terjawab – kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan sesuatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat.

Aktivitas analisis didalam kebijakan publik pada dasarnya terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu lain. Oleh karena itu didalam kebijakan publik akan terlihat suatu gambaran bersintesanya berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Berdasarkan pendekatan kebijakan publik, maka akan terintegrasi antara kenyataan praktis dan pandangan teoritis secara bersama-sama. Dalam kesempatan ini Randal B. Ripley menyatakan (Ripley, 1985:31) :

"Didalam proses kebijakan telah termasuk didalamnya berbagai aktivitas praktis dan intelektual yang berjalan secara bersama-sama."

Terdapat 3 (tiga) rangkaian kesatuan penting didalam analisis kebijakan publik yang perlu dipahami, yaitu formulasi kebijakan (*policy formulation*), implementasi kebijakan (*policy implementation*) dan evaluasi kebijakan (*policy evaluation*). Di dalam kesempatan ini dibahas lebih lanjut mengenai implementasi kebijakan, karena memiliki relevansi dengan tema kajian.

2. Implementasi Kebijakan

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

Implementasi yang merupakan terjemahan dari kata "*implementation*". berasal dari kata kerja "*to implement*". Sehubungan dengan kata implementasi ini. Pressman dan Wildavsky (1973:xxi) mengemukakan bahwa : "*implementation as to carry out. accomplish. fulfill. produce. complete.*" Maksudnya implementasi yaitu untuk membawa. menyelesaikan. mengisi. menghasilkan. dan melengkapi. Jadi secara etimologis implementasi itu dapat dimaksudkan sebagai suatu aktivitas yang bertalian dengan penyelesaian suatu pekerjaan dengan penggunaan sarana (alat) untuk memperoleh hasil.

Grindle (1980:7) menyatakan. implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Sedangkan Van Meter dan Horn (Wibawa. dkk.. 1994:15) menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle (1980:7) menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan. program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Selanjutnya Anderson (1978:25) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan. bahwa : "*Policy implementation is the application of the policy by the government's administrative machinery to the problem*". Mengacu pada pendapat Van Meter dan Van Horn. Wibawa mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai berikut :

> "Implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individual maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan" (Wibawa. 1994:15)

Jones (1996:166) mengemukakan mengenai implementasi kebijakan. yaitu: *implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect* (implementasi adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan untuk melaksanakan sebuah program yang dimaksudkan untuk menimbulkan akibat tertentu)

Pengertian yang lebih jelas mengenai implementasi kebijakan dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier sebagaimana dikutip oleh Wahab sebagai berikut :

> *Implementation is the carrying out of basic policy decision. usually incorporated in a statute but which can also take important executive ordess or court decision. Ideally that decision identifies the problem to be addressed. stipulates the objective to be pursued. and in a variety ways. "tructures" the implementation process. The process normally runs through a number of stages beginning with passage of basic statute. followed by the policy outputs (decision) of the implementing agencies. the compliance of target groups with those outputs. the perceived impacts of agency decisions. and finally. important revision (or attempted revisions in the basic statute).* (Wahab. 2002:65)

Dengan demikian dalam pandangan Mazmanian dan Sabatier. implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar. biasanya dalam bentuk undang-undang. namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya. keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi. menyebutkan secara tegas tujuan sasaran yang ingin dicapai. dan berbagai cara untuk menstrukturkan/mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tersebut. biasanya diawali dengan tahapan pengesahan undang-undang. kemudian *output* kebijakan dalam

bentuk pelaksanaan kebijakan oleh badan (instansi) pelaksana. kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran. dampak nyata baik yang dikehendaki atau yang tidak dikehendaki dari *output* tersebut. dampak keputusan. dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting (atau upaya untuk melakukan perbaikan-perbaikan) terhadap undang-undang/peraturan tersebut.

Hal penting lainnya dalam implementasi kebijakan publik adalah: (a) harus berorentasi pada kepentingan umum. (b) dipahami oleh aparatur administrasi negara yang melaksanakan kebijakan. (c) diterima oleh masyarakat yang menjadi sasaran kebijakan publik.

Dalam studi kebijakan publik. terdapat banyak model mengenai proses implementasi kebijakan (*a model of the policy process*). Menurut Edwards III (1980:1). *policy implementation is the stage of policymaking between establishment of policy...and the consequences of the policy for the people whom it affects* Selanjutnya George Edwards III berpendapat agar implementasi kebijakan dapat sukses dilaksanakan maka ada empat faktor kritis yang harus diperhatikan. yaitu :

> *There are four critical factors or variables in implementing publicpolicy :*
> *1. Communication.*
> *2. Resources.*
> *3. Dispositions.*
> 4. *Bureaucratic Structure.*
> (Edwards III. 1980:10)

Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dalam implementasi suatu kebijakan. karena kekuranglengkapan salah satu syarat akan berpengaruh pada implementasi suatu kebijakan. Charles O. Jones mengemukakan teori

implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. yaitu *organization. interpretation. and application.* Selengkapnya Jones mengemukakan bahwa:

> *Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect. three activities. in particular. are significant :*
> 1. *Organization: the establishment or rearrangement of resources. unit and methods for putting a policy into effect*
> 2. *Interpretation: the translation of program language (often contaned in a statute) into acceptable and feasible plans and directives*
> 3. *Application: the routine provision of service. paymens. or other agree upon objectives of instruments.*
>
> (Jones. 1984:166)

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan. yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya. unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana kebijakan. yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir. aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan. pembayaran. atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

2.1 Dimensi Organisasi

Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas untuk membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang

diperlukan guna mencapai tujuan-tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Hal ini juga dinyatakan oleh Stephen P. Robbins sebagai berikut:

> Organisasi adalah kesatuan (*entity*) sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. (Robbins, 1994:4)

Mengenai ketersediaan sumber daya, Edwards III mengemukakan sumber-sumber daya yang penting dalam implementasi kebijakan antara lain mencakup :

1. *Staff*
   One consequence of personnel shortages in ineffectiveness in directly carrying out policies. Insufficient staff is especially critical to implementation when the policy involved is one which imposes on people unwelcome constraints wheter they be the requirements of grant policies, regulatory policies or criminal law. Skill as well as numbers is an important characteristic of staff implementation.
2. *Authority*
   Authority varies from program to program and comes in many different form. Policies that requires government oversight or regulation of others in the public or private sectors are those for which authority is most likely to be inadequate. It is in regulating others where sufficient authority is most often lacking, sometimes it does not exist even on paper. Lack of effective authority leads officials to adopt a service rather than a regulatory orientation toward those who are involved in regulation.
3. *Facilities*
   Physical facilities may also be critical resources in implementation. A lack of essential buildings, equipment, supplies, or land can hinder policy implementation as much as can inadequacies in the other resources that have examine.
   (Edwards III, 1980:79-82)

Implementasi kebijakan memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar, sebagaimana Jones mengemukakan sebagai berikut:

> Pemimpin untuk memberikan perintah yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban tersebut dan kemudian dibagikan dalam cara yang tetap serta dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan yang berhubungan dengan cara-cara paksaan dan sejenisnya, yang akan dikenakan sanksi berupa pemecatan atau pembuangan bagi para pejabat yang melakukannya. (Jones, 1994:306)

Ada beberapa hal penting mengenai konsep birokrasi. Pertama, sistem ideal birokrasi Weber dalam kenyataannya jarang terealisasi sehingga perlu ditekankan dalam implementasi. Kedua, implementasi adalah sebuah proses yang sifatnya dinamis yang dapat bervariasi pada berbagai permasalahan. Pelaksanaan kebijakan sangat bervariasi dan tergantung pada badan atau institusi pelaksana. Charles O. Jones (1984:176) mengemukakan bahwa "*the point is that implementation of policy may very depending on the particular stage of agency development.*" Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah menjalankan program- program yang telah dirancang.

2.2 Dimensi Interpretasi

Interpretasi ialah usaha untuk mengerti apa yang dimaksud oleh pembentuk kebijakan dan mengetahui betul apa dan bagaimana tujuan akhir itu harus diwujudkan atau direalisasikan. Dimensi interpretasi ini hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Edwards III dalam dimensi komunikasi. Jones mengutip pendapat Edwards III sebagai berikut :

> *"The first requirement for effective policy implementation is that those who are to implement a decision must knom what they are supposed to do...*
> *If policies are to be implemented properly, implementation directives must not only be received, but they must also be clear. If they are not,*

implementers will be confused about what they should do, and they will have discretion to impose their own views on the implementation of policies, views that may be different from those of their superiors" (Jones, 1984:178)

Agar tidak terjadi kebingungan apa yang akan dilakukan oleh para pelaksana kebijakan, maka mereka yang menerapkan keputusan haruslah tahu apa yang seharusnya mereka lakukan, sehingga para pelaksana dapat mengetahui dengan pasti tujuan apa yang hendak dicapai dalam implementasi kebijakan tersebut.

Dalam buku yang ditulisnya, George Edwards III mengemukakan karakteristik komunikasi dalam implementasi kebijakan terdiri dari tiga bagian utama, yaitu transmisi, kejelasan, dan konsistensi, sebagaimana dijelaskan pada bagian berikut ini:

1. *Transmission*
   Transmission lapses are prime causes of implementation failure. High level policymaker must rely upon others to transmit and carry out their decisions and orders. Implementation instructions are more likely to be transmitted accurately if a relative small and cohesive group of people is responsible for implementation. The better develop the channel of communication for transmitting implementation instructions, the higher the probability of these instructions being transmitted correctly.
2. *Clarity*
   Implementation directives must not only be received, but must also be clear. Implementation instructions that do not specify the goals of a policy and how to achieve them are common if communication are not clear, implementor will have more discretion to exercise in interpreting policy requirements. This discretion will make a conscious effort to exploit the ambiguity.
3. *Consistency*
   Related to but conceptually distinct from the clarity of communications is their consistency. When implementors receive inconsistent instructions, they will inevitably be unable to meet all the demands made upon them. Inconsistency, like ambiguity, result from a desire not to alinate interest, and the greater the number of computing interest that seek to influence a policy's implementation, the greater the chance of inconsistence implementation instruction.

(Edwards III, 1980:43-46)

Sementara itu, Charles O. Jones mengemukakan lebih lanjut bahwa selain patokannya harus jelas, langkah selanjutnya adalah mengembangkan sarana untuk menerapkannya. Bagaimana para pelaksana akan melaksanakan tugasnya tergantung pada sejumlah keadaan, dimana hal terpenting pada masalah ini adalah perkiraan para pelaksana tersebut tentang proses yang harus dipelajari dan estimasi ketersediaan sumber daya. Berikut penjelasan menurut Charles O. Jones:

> *"A clear standard must also be applied, which involes, at a minimum, a process by which implementers learn that the standard is and develop means for appliying it. Where the standard is not clear, however implementers are faced with havier responsibilities. Wheter and how they assume these responsibilities depends on a multitude of conditions. Surely, among the most important of these is the implementors' estimate of the available resources"* (Jones, 1984:178)

Berdasarkan pada penjelasan mengenai dimensi interpretasi yang telah dipaparkan, selanjutnya Charles O. Jones (1984:178) menegaskan mengenai interpretasi oleh para pelaksana kebijakan sebagai berikut :

> *That the implementer must respond to the question, What do I do now? disturbs many people. it guarantees frustration for the tidy mind seeking Closure in the policy process. It is not surprising, therefore, that formulas for good administration or effective implementation are developed. Typically these formulas emphasize clarity, precision, consistency, priority setting, adequate resources and the like. The study of public administration is replete with these guides to efficient management.* (Jones, 1984:178)

Dengan demikian jelaslah bahwa interpretasi dari para pelaksana kebijakan harus mengetahui dengan baik mengenai substansi kebijakan, makna kebijakan, dan tujuan kebijakan agar penfsiran ini tidak menyimpang dari kebijakan tersebut.

2.3 Dimensi Aplikasi

Aplikasi ialah penerapan secara rutin dari segala keputusan dan peraturan- peraturan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk tercapainya tujuan kebijakan. Jones (1984:180) menyatakan bahwa *Application simply refers to doing the job. It includes "providing goods and services" as well as other programmatic objectives (for examples, regulation and defense).*

Penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis dimana para pelaksananya ataupun para petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya, ataupun secara khusus diarahkan oleh kondisi yang aktual. Berikut ini penjelasan menurut Charles O. Jones :

> *"Adjustments in either organization or interpretation during program application are not at all unusual. A political feasible interpretation of authority may turn out in to be impractical in the field. Application is often a dynamic process in which the implementor are enforcer is guided generally by program directives or standards and specifically by actual circumstances"* (Jones, 1984:180)

Penentuan tarif pembayaran merupakan bagian dari kegiatan dalam aplikasi kebijakan. Charles O. Jones (1994:296) mengemukakan bahwa: "aplikasi terdiri dari kegiatan yang melakukan ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran, atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program."

Selanjutnya, dalam melaksanakan kebijakan, para pelaksana diarahkan oleh pedoman-pedoman program maupun patokan-patokannya. Selain itu pelaksanaan pun bersifat dinamis. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Jones:

> Suatu penafsiran politis dari yang berwenang mungkin tak akan dapat dipraktekkan di lapangan, dan sebaliknya penerapan seringkali merupakan suatu proses dinamis di mana para pelaksananya ataupun para

petugas diarahkan oleh pedoman program maupun patokan-patokannya. (Jones, 1994:325)

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksanaan harus juga memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, dan objektivitas. Mengenai hal ini, Jones mengemukakan:

> Aplikasi pelaksanaan kebijakan publik merupakan suatu proses aktif dan selalu berubah. Hal ini tidak hanya menunjuk pada sebuah kemungkinan kecil terhadap penerapan harfiah suatu peraturan, tetapi juga menunjukkan bahwa mereka yang membuat upaya semacam itu akan menghadapi permasalahan dalam organisasinya. Aplikasi ini adalah suatu varian dengan konsep administrasi serta ilmu manajemen yang menekankan pada terciptanya tujuan kebijakan yang efektif dan efisien serta dilaksanakan oleh suatu pelayanan sipil yang objektif. (Jones, 1994: 328)

Dalam aplikasi kebijakan, pelaksana dituntut pula untuk memiliki strategi yang tepat dalam melaksanakan kebijakan, disertai dengan pengelolaan terhadap pendukung kebijakan, serta antisipasi terhadap pihak yang dirugikan. Mengenai hal ini, Jones menjelaskan:

> Eugene Bardach menggunakan gagasan "permainan" sebagai "metafor utama yang mengarahkan perhatian serta merangsang pandangan" di dalam pengkajian pelaksanaan. Dalam bentuknya "*games* atau permainan" melibatkan peraturan, pemain, strategi, pihak yang menang, serta pihak yang kalah; penggunaan mereka sebagai metafora menghapuskan pemikiran bahwa hanya terdapat satu cara dalam mencapai tujuan tersebut Penulis sadar betul bahwa tidak satu pun permainan atau pertandingan dapat dimenangkan dengan hanya bermodalkan strategi. (Jones, 1994: 324-325)

Aplikasi juga harus mempertimbangkan aspek politik, dimana politik selalu melibatkan kepentingan berbagai pihak dan juga rawan konflik. Charles O. Jones kemudian menyatakan *conflict means ambivalence* dengan pernyataan berikut :

> *Politics always involve conflicts. For the Individual decision maker group conflict means ambivalence, and ambivalence can be described In behavioral terms as the concomitant of taking of Incompatible roles,*

Enforcers and "en· forced" alike assume both the role of the potential violator and the role of his victim. Out of their responses to such mutual role taking come the rules as actualy acted out; the specification of the loopholes, penalties, and rewards that reflect an acceptable adjustment of these incompatible roles. (Jones, 1984:181)

Berdasarkan pernyataan tersebut, maka aplikasi kebijakan publik ini merupakan upaya yang menekankan *the establishment of policy goals,* agar tujuan kebijakan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien *(to be effectively and efficiently)* dalam sebuah pelayanan di bidang pengelolaan sampah yang sesungguhnya kepada masyarakat *(objective civil service).*

Implementasi kebijakan dalam program pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap dilakukan untuk menjaga penyelenggaraan pengelolaan sampah agar tepat sasaran. Pengelolaan sampah merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk pelaksanaan kebijakan umum dan teknis tentang kebesrihan lingkungan.

Kegiatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah ini pada dasarnya dilakukan dalam rangka mengejawantahkan semboyan Kabupaten Tana Tidung yang "BERJUANG" khususnya dalam lingkup "BERSIH" yang berarti lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Tujuan kebijakan pengelolaan sampah akan tercapai apabila tujuan dari kegiatan implementasi kebijakan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan langkah-langkah dalam implementasi kebijakan.

Implementasi kebijakan merupakan proses untuk mencapai tujuan yang telah digariskan sebelumnya. Mengacu pada pendapat Van Meter dan Van Horn, Wibawa (1994:15) mengemukakan pengertian implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta baik secara individual

maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana dirumuskan di dalam kebijakan.

Dari definisi implementasi kebijakan dan komponennya tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan merupakan upaya untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Jones (1984:178) mengungkapkan "*effective program implementation is likely to be rare if clarity is a preguiresite. It appears to be unwritten law that the more complex the social issue, the more ambiguous the cocial policy*". Pendapat Jones tersebut menunjukan bahwa implementasi kebijakan jarang dijadikan sebagai penilaian dan hanya menjadi suatu yang tidak tertulis. Jones mengutip pendapat Edward III " *the first requirement for effective implementation is that those who are to implement a decision must knaow what they are supposed to do...*" (Jones, 1984:178). Hal ini menunjukkan Edward III melihat adanya hubungan antara implementasi kebijakan dengan implementor, dan bagaimana kebijakan tersebut dapat terimplementasikan tergantung kepada sejauh mana implementor memahami apa yang harus mereka kerjakan.

Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones tersebut. maka masalah implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas. dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari organisasi. interpretasi dan aplikasi.

Fungsi Implementasi kebijakan adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan atau sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai suatu outcome. Dalam kamus Webster. pengertian implementasi dirumuskan

secara pendek. dimana to implement *berarti to provide means for carrying out: to give practical effect to* (menyajikan alat bantu untuk melaksanakan: menimbulkan dampak/berakibat sesuatu).

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan. program-program telah dibuat. dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut. Jadi Pelaksanaan kebijakan dirumuskan secara pendek to implement (untuk pelaksana) berarti to provide the means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu).

Maka pelaksanaan kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan. Biasanya dalam bentuk perundang-undangan. peraturan pemerintah. peraturan daerah. keputusan peradilan perintah eksekutif. atau dekrit presiden.

3. Model Implementasi Kebijakan

Menurut Sabatier (1986: 21-48). terdapat dua model yang berpacu dalam tahap implementasi kebijakan. yakni model *top down* dan model *bottom up*. Kedua model ini terdapat pada setiap proses pembuatan kebijakan. Model elit. model proses dan model inkremental dianggap sebagai gambaran pembuatan kebijakan berdasarkan model *top down*. Sedangkan gambaran model *bottom up* dapat dilihat pada model kelompok dan model kelembagaan.

Grindle (1980: 6-10) memperkenalkan model implementasi sebagai proses politik dan administrasi. Model tersebut menggambarkan proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh beragam aktor. dimana keluaran akhirnya ditentukan oleh baik materi program yang telah dicapai maupun melalui interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dapat terlihat melalui proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai aktor kebijakan. sedangkan proses administrasi terlihat melalui proses umum mengenai aksi administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu.

Gambar 2.1
Implementation as a Political and Administrative Process
(Grindle. 1980)

T.B. Smith mengakui. ketika kebijakan telah dibuat. kebijakan tersebut harus diimplementasikan dan hasilnya sedapat mungkin sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pembuat kebijakan (Nakamura & Smallwood, 1980:2). Pada

gambar 2.1 terlihat bahwa suatu kebijakan memiliki tujuan yang jelas sebagai wujud orientasi nilai kebijakan. Tujuan implementasi kebijakan diformulasi ke dalam program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai. Program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Implementasi kebijakan atau program. secara garis besar dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasi. Keseluruhan implementasi kebijakan dievaluasi dengan cara mengukur luaran program berdasarkan tujuan kebijakan. Luaran program dilihat melalui dampaknya terhadap sasaran yang dituju baik individu dan kelompok maupun masyarakat. Luaran implementasi kebijakan adalah perubahan dan diterimanya perubahan oleh kelompok sasaran.

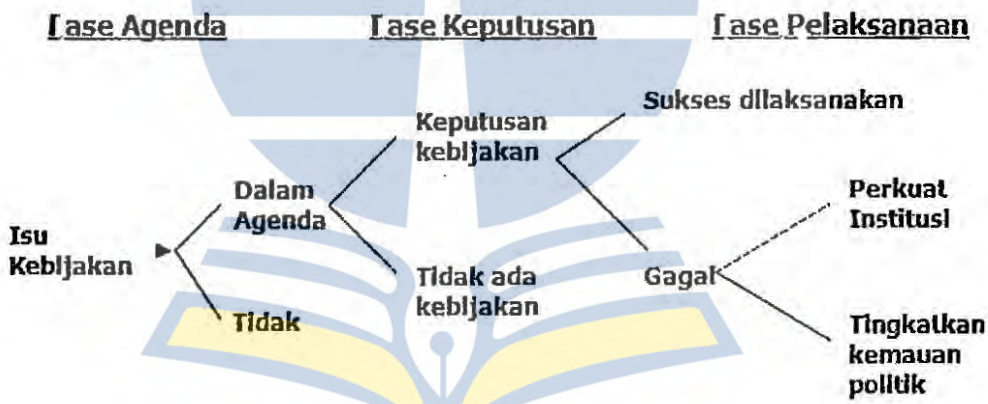

Gambar 2.2
Model Linier Implementasi Kebijakan
(dikutip dari Baedhowi. 46-48)

Pada aspek pelaksanaan. terdapat dua model implementasi kebijakan publik yang efektif. yaitu model linier dan model interaktif (lihat Baedhowi. 2004: 47). Pada model linier. fase pengambilan keputusan merupakan aspek yang terpenting. sedangkan fase pelaksanaan kebijakan kurang mendapat perhatian atau dianggap sebagai tanggung jawab kelompok lain. Keberhasilan pelaksanaan

kebijakan tergantung pada kemampuan instansi pelaksana. Jika implementasi kebijakan gagal maka yang disalahkan biasanya adalah pihak manajemen yang dianggap kurang memiliki komitmen sehingga perlu dilakukan upaya yang lebih baik untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan

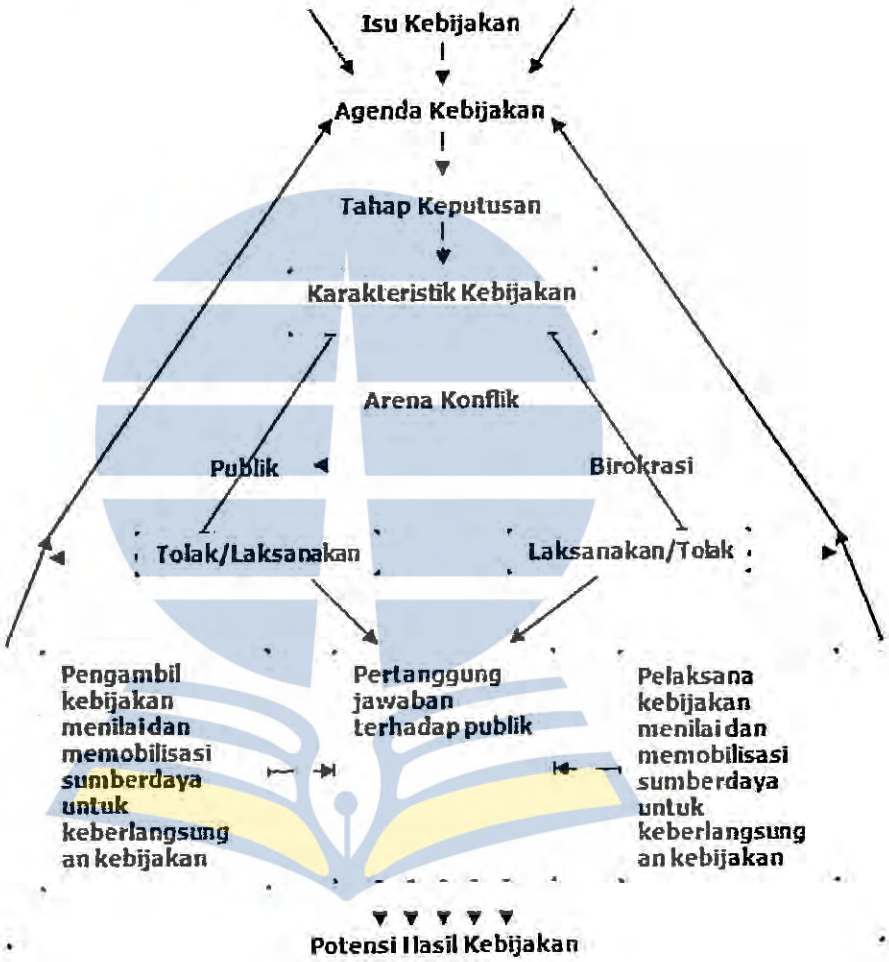

Gambar 2.3
Model Interaktif Implementasi Kebijakan (Thomas. 1981)

Berbeda dengan model linier. model interaktif menganggap pelaksanaan kebijakan sebagai proses yang dinamis. karena setiap pihak yang terlibat dapat mengusulkan perubahan dalam berbagai tahap pelaksanaan. Hal itu dilakukan ketika kebijakan publik dianggap kurang memenuhi harapan *stakeholders*. Ini

berarti bahwa berbagai tahap implementasi kebijakan publik akan dianalisis dan dievaluasi oleh setiap pihak sehingga potensi. kekuatan dan kelemahan setiap fase pelaksanaannya diketahui dan segera diperbaiki untuk mencapai tujuan.

Pada gambar 2.3, terlihat bahwa meskipun persyaratan input sumberdaya merupakan keharusan dalam proses implementasi kebijakan. tetapi hal itu tidak menjamin suatu kebijakan akan dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya dapat digunakan secara optimum jika dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan terjadi interaksi positif dan dinamis antara pengambil kebijakan. pelaksanaan kebijakan dan pengguna kebijakan (masyarakat) dalam suasana dan lingkungan yang kondusif.

Jika model interaktif implementasi kebijakan di atas disandingkan dengan model implementasi kebijakan yang lain. khususnya model proses politik dan administrasi dari Grindle. terlihat adanya kesamaan dan representasi elemen yang mencirikannya. Tujuan kebijakan. program aksi dan proyek tertentu yang dirancang dan dibiayai menurut Grindle menunjukkan urgensi fase pengambilan keputusan sebagai fase terpenting dalam model linier implementasi kebijakan. Sementara itu. enam elemen isi kebijakan ditambah dengan tiga elemen konteks implementasi sebagai faktor yang mempengaruhi aktivitas implementasi menurut Grindle mencirikan adanya interaksi antara pengambil kebijakan. pelaksana kebijakan dan pengguna kebijakan dalam model interaktif. Begitu pula istilah model proses politik dan proses administrasi menurut Grindle. selain menunjukkan dominasi cirinya yang cenderung lebih dekat kepada ciri model interaktif implementasi kebijakan. juga menunjukkan kelebihan model tersebut

dalam cara yang digunakan untuk mengukur keberhasilan implementasi kebijakan. beserta output dan outcomesnya.

Selain model implementasi kebijakan di atas Van Meter dan Van Horn mengembangkan Model Proses Implementasi Kebijakan. (Tarigan. 2000:20). Keduanya meneguhkan pendirian bahwa perubahan. kontrol dan kepatuhan dalam bertindak merupakan konsep penting dalam prosedur implementasi. Keduanya mengembangkan tipologi kebijakan menurut: (i) jumlah perubahan yang akan dihasilkan. dan (ii) jangkauan atau ruang lingkup kesepakatan mengenai tujuan oleh berbagai pihak yang terlibat dalam proses implementasi.

Tanpa mengurangi kredibilitas model proses implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn terlihat bahwa elemen yang menentukan keberhasilan penerapannya termasuk ke dalam elemen model proses politik dan administrasi menurut Grindle. Kata kunci yakni perubahan. kontrol dan kepatuhan termasuk dalam dimensi isi kebijakan dan konteks implementasi kebijakan. Demikian pula dengan tipologi kebijakan yang dibuat oleh keduanya termasuk dalam elemen isi kebijakan dan konteks implementasi menurut Grindle. Tipologi jumlah perubahan yang dihasilkan termasuk dalam elemen isi kebijakan dan tipologi ruang lingkup kesepakatan termasuk dalam konteks implementasi.

Sejalan dengan pendapat di atas, Korten (baca dalam Tarigan. 2000:19) membuat Model Kesesuaian implementasi kebijakan atau program dengan memakai pendekatan proses pembelajaran. Model ini berintikan kesesuaian antara tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program. yaitu program itu sendiri. pelaksanaan program dan kelompok sasaran program.

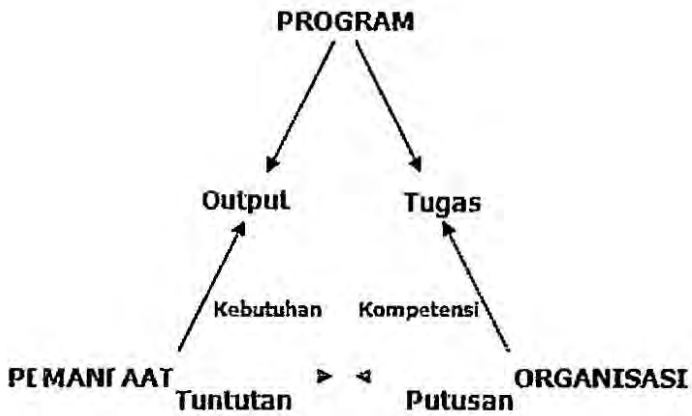

Gambar. 2.4.
Model Kesesuaian
(Dikutip dari David C. Korten (1988) dalam Tarigan, h. 19)

Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama. kesesuaian antara program dengan pemanfaat. yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua. kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana. yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga. kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana. yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.

Berdasarkan pola yang dikembangkan Korten. dapat dipahami bahwa jika tidak terdapat kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan. kinerja program tidak akan berhasil sesuai dengan apa yang diharapkan. Jika output program tidak sesuai dengan kebutuhan kelompok sasaran jelas outputnya tidak dapat dimanfaatkan. Jika organisasi pelaksana program tidak memiliki

kemampuan melaksanakan tugas yang disyaratkan oleh program maka organisasinya tidak dapat menyampaikan output program dengan tepat. Atau. jika syarat yang ditetapkan organisasi pelaksana program tidak dapat dipenuhi oleh kelompok sasaran maka kelompok sasaran tidak mendapatkan output program. Oleh karena itu. kesesuaian antara tiga unsur implementasi kebijakan mutlak diperlukan agar program berjalan sesuai dengan rencana yang telah dibuat.

Model kesesuaian implementasi kebijakan yang diperkenalkan oleh Korten memperkaya model implementasi kebijakan yang lain. Hal ini dapat dipahami dari kata kunci kesesuaian yang digunakan. Meskipun demikian. elemen yang disesuaikan satu sama lain – program. pemanfaat dan organisasi – juga sudah termasuk baik dalam dimensi isi kebijakan (program) dan dimensi konteks implementasi (organisasi) maupun dalam outcomes (pemanfaat) pada model proses politik dan administrasi dari Grindle.

4. Kriteria Pengukuran Implementasi Kebijakan

Menurut Grindle (1980: 10) dan Quade (1984: 310). untuk mengukur kinerja implementasi suatu kebijakan publik harus memperhatikan variabel kebijakan. organisasi dan lingkungan. Perhatian itu perlu diarahkan karena melalui pemilihan kebijakan yang tepat maka masyarakat dapat berpartisipasi memberikan kontribusi yang optimal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selanjutnya. ketika sudah ditemukan kebijakan yang terpilih diperlukan organisasi pelaksana. karena di dalam organisasi ada kewenangan dan berbagai sumber daya yang mendukung pelaksanaan kebijakan bagi pelayanan publik. Sedangkan

lingkungan kebijakan tergantung pada sifatnya yang positif atau negatif. Jika lingkungan berpandangan positif terhadap suatu kebijakan akan menghasilkan dukungan positif sehingga lingkungan akan berpengaruh terhadap kesuksesan implementasi kebijakan. Sebaliknya. jika lingkungan berpandangan negatif maka akan terjadi benturan sikap. sehingga proses implementasi terancam akan gagal. Lebih daripada tiga aspek tersebut. kepatuhan kelompok sasaran kebijakan merupakan hasil langsung dari implementasi kebijakan yang menentukan efeknya terhadap masyarakat.

Kriteria pengukuran keberhasilan implementasi menurut Ripley dan Franklin (1986: 12) didasarkan pada tiga aspek. yaitu: (1) tingkat kepatuhan birokrasi terhadap birokrasi di atasnya atau tingkatan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang. (2) adanya kelancaran rutinitas dan tidak adanya masalah; serta (3) pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki dari semua program yang ada terarah. Sedangkan menurut Goggin *et al.* (1990: 20-21. 31-40). proses implementasi kebijakan sebagai upaya transfer informasi atau pesan dari institusi yang lebih tinggi ke institusi yang lebih rendah diukur keberhasilan kinerjanya berdasarkan variabel: (1) dorongan dan paksaan pada tingkat federal. (2) kapasitas pusat/negara. dan (3) dorongan dan paksaan pada tingkat pusat dan daerah.

Variabel dorongan dan paksaan pada tingkat pusat ditentukan oleh legitimasi dan kredibilitas. yaitu semakin sahih kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat di mata daerah maka semakin besar kredibilitasnya. begitu pula sebaliknya. Untuk mengukur kekuatan isi dan pesan kebijakan dapat dilihat

melalui: (i) besarnya dana yang dialokasikan. dengan asumsi bahwa semakin besar dana yang dialokasikan maka semakin serius kebijakan tersebut dilaksanakan dan (ii) bentuk kebijakan yang memuat antara lain. kejelasan kebijakan. konsistensi pelaksanaan. frekuensi pelaksanaan dan diterimanya pesan secara benar. Sementara itu. untuk mengetahui variabel kapasitas pusat atau kapasitas organisasi dapat dilihat melalui seberapa jauh organisasi pelaksana kebijakan mampu memanfaatkan wewenang yang dimiliki. bagaimana hubungannya dengan struktur birokrasi yang ada dan bagaimana mengkoordinasikan berbagai sumberdaya yang tersedia dalam organisasi.

Selain kriteria pengukuran implementasi kebijakan di atas. perlu pula dipahami adanya hubungan pengaruh antara implementasi kebijakan dengan faktor lain. Hal ini sesuai dengan pendapat Van Meter dan Van Horn (lihat Grindle. 1980: 6) bahwa terdapat variabel bebas yang saling berkaitan sekaligus menghubungkan antara kebijakan dengan prestasi kerja. Variabel yang dimaksud oleh keduanya meliputi: (i) ukuran dan tujuan kebijakan. (ii) sumber kebijakan. (iii) ciri atau sifat badan/instansi pelaksana. (iv) komunikasi antar organisasi terkait dan komunikasi kegiatan yang dilaksanakan. (v) sikap para pelaksana. dan (vi) lingkungan ekonomi. sosial dan politik.

Menurut Quade (1984: 310). dalam proses implementasi kebijakan yang ideal akan terjadi interaksi dan reaksi dari organisasi pengimplementasi. kelompok sasaran dan faktor lingkungan yang mengakibatkan munculnya tekanan dan diikuti dengan tindakan tawar-menawar atau transaksi. Dari transaksi tersebut diperoleh umpan balik yang oleh pengambil kebijakan dapat digunakan sebagai

bahan masukan dalam perumusan kebijakan selanjutnya. Quade memberikan gambaran bahwa terdapat empat variabel yang harus diteliti dalam analisis implementasi kebijakan publik. yaitu: (1) Kebijakan yang diimpikan. yaitu pola interaksi yang diimpikan agar orang yang menetapkan kebijakan berusaha untuk mewujudkan; (2) Kelompok target. yaitu subyek yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi baru melalui kebijakan dan subyek yang harus berubah untuk memenuhi kebutuhannya; (3) Organisasi yang melaksanakan. yaitu biasanya berupa unit birokrasi pemerintah yang bertanggungjawab mengimplementasikan kebijakan; dan (4) Faktor lingkungan. yaitu elemen dalam lingkungan yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

Sebagai komparasi dapat dipahami pemikiran Mazmanian dan Sabatier yang mengembangkan "kerangka kerja analisis implementasi" (lihat Wahab. 1991: 117). Menurutnya. peran penting analisis implementasi kebijakan negara ialah mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi pencapaian tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi. Variabel yang dimaksud oleh Mazmanian dan Sabatier diklasifikasikan ke dalam tiga kategori umum. yaitu: (1) mudah atau sulitnya dikendalikan masalah yang digarap; (2) kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasinya; dan (3) pengaruh langsung variabel politik terhadap kesimbangan dukungan bagi tujuan yang termuat dalam kebijakan. Ketiga variabel ini disebut variabel bebas yang dibedakan dengan tahap implementasi yang harus dilalui sebagai variabel terikat.

Variabel mudah atau sulitnya suatu masalah dikendalikan mencakup: (i) kesukaran teknis. (ii) keragaman perilaku kelompok sasaran. (iii) persentase

kelompok sasaran dibandingkan dengan jumlah penduduk. dan (iv) ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan. Variabel kemampuan kebijakan untuk mensistematisasi proses implementasi mencakup: (i) kejelasan dan konsistensi tujuan. (ii) ketepatan alokasi sumber daya. (iii) keterpaduan hirarki dalam dan di antara lembaga pelaksana. (iv) aturan keputusan dari badan pelaksana. (v) rekruitmen pejabat pelaksana. dan (vi) akses formal pihak luar. Variabel di luar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi mencakup: (i) kondisi sosial ekonomi dan teknologi. (ii) dukungan publik. (iii) sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok. (iv) dukungan dari pejabat atasan. dan (v) komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana (Keban. 2007: 16). Sedangkan variabel terikat yang ditunjukkan melalui tahapan dalam proses implementasi mencakup: (i) output kebijakan badan pelaksana. (ii) kesediaan kelompok sasaran mematuhi output kebijakan. (iii) dampak nyata output kebijakan. (iv) dampak output kebijakan sebagaimana yang dipersepsikan. dan (v) perbaikan.

5. Pengelolaan Sampah Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008.

Definisi sampah. sebagaimana yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008. adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Yang termasuk jenis sampah adalah sampah rumah tangga (tidak termasuk tinja). sampah sejenis sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial. kawasan industri. kawasan khusus. fasilitas sosial. fasilitas umum dan fasilitas lainnya serta sampah spesifik. Yang terakhir ini

adalah sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun dan limbah bahan berbahaya dan beracun. sampah yang timbul akibat bencana. puing bongkaran bangunan. sampah yang secara teknologi belum dapat diolah; dan sampah yang timbul secara tidak periodik (Salim. 1993).

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis. menyeluruh. dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Pengurangan sampah dapat dilakukan melalui pembatasan timbulan sampah (***reduce***). pemanfaatan kembali sampah (***reuse***) dan pendauran ulang sampah (***recycle***). Kegiatan penanganan sampah meliputi :

1) Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis. jumlah dan sifat sampah.
2) Pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu.
3) Pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
4) Pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik. komposisi. dan jumlah sampah.
5) Pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

Sementara untuk pengelolaan sampah spesifik menjadi tanggung jawab pemerintah yang diatur dengan Peraturan Pemerintah (Sejati. 2009).

Dalam undang-undang pengelolaan sampah ini juga disebutkan larangan bagi setiap orang untuk memasukkan sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. mengimpor sampah. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan. melakukan penanganan sampah dengan pembuangan terbuka di tempat pemrosesan akhir serta membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah. Dalam hal. suatu daerah masih menggunakan sistem pembuangan terbuka (***open dumping***) dalam pengelolaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampahnya. maka pihak Pemerintah Daerah tersebut harus membuat perencanaan penutupan tempat pemrosesan akhir sampah dan harus menutup tempat pemrosesan akhir sampah tersebut paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini tersebut (Sejati. 2009).

B. Hasil Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Untuk menghindari duplikasi, peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian terdahulu. Dari hasil penelusuran penelitian terdahulu, diperoleh beberapa masalah yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti yaitu. tentang implementasi pengelolaan sampah.

Sutarto (2004). telah melakukan penelitian dengan judul Implementasi Kebijakan Persampahan di Kota Semarang. Hasil penelitian menunjukkan hasil bahwa penanganan yang dilakukan Dinas Kebersihan Kota Semarang dalam pengelolaan sampah masih belum optimal. Hal ini dikarenakan kurangnya proses transmisi kebijakan penanganan sampah. kurangnya kejelasan kelompok sasaran/masyarakat dalam menerima informasi. kurang memadainya komunikasi aparat pelaksana kebersihan. rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. dan kurang terpadunya dalam penanganan sampah.

Nugraha (2014). telah melakukan penelitian dengan judul :"implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi". Hasil dari Penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Cimahi cukup efektif tetapi belum maksimal. Komunikasi yang dilakukan telah cukup maksimal tetapi masyarakat belum semua memahami dampak dari sampah. Sumber daya aparatur yang kurang untuk mengatasi sampah diseluruh Kota Cimahi. dan kendaraan oprasiaonal yang masih terbatas. Disposisi berpedoman kepada peraturan- peraturan yang ada. akan tetapi masih adanya aparatur yang menjalankan tupoksi di luar peraturan-peraturan yang terkait masalah sampah di Kota Cimahi. Struktur birokrasi sudah terkoordinasi dengan baik. akan tetapi dalam pelaksanaannya ada beberapa aparatur yang menjalankan tupoksi tidak sesuai dengan SOP.

Prasetio (2011). telah melakukan penelitian dengan judul " Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah di Kelurahan Jomblang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang

Pengelolan Sampah). Penelitian ini bertujuan untuk: (1) memperoleh gambaran proses perencanaan dan pengelolaan sampah rumah tangga berbasis masyarakat. (2) menginventarisir tantangan dan peluang dalam pengelolaan sampah rumah tangga. (3) mengajukan usulan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. yaitu penelitian yang bermaksud mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilokasi penelitian dengan menggunakan analisis sosio yuridis. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara. observasi dan dokumentasi. sedangkan analisis data menggunakan teknik deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian. salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam upaya perbaikan lingkungan yaitu dengan memberikan sumbangan tenaga berupa kerja bakti. Selain itu. mereka juga mengadakan pertemuan warga yang dilakukan satu kali dalam sebulan. yang dihadiri oleh sebagian warga untuk tingkat RW dan seluruh warga untuk tingkat RT. Dalam hal ini tingkat RT cenderung berbentuk partisipasi langsung sedangkan tingkat RW berbentuk partisipasi tak langsung. Warga melakukan kegiatan tersebut tanpa merasa terpaksa sama sekali. Tingkat peran serta masyarakat yang terjadi di Kelurahan Jomblang menurut kategori Arnstein dapat digolongkan pada tingkat Informing/Pemberian Informasi. Bentuk peran serta masyarakat ini dipengaruhi oleh lamanya tinggal. karena semakin banyak warga yang dikenal maka semakin kuat ikatan psikologis dengan lingkunganya

Mazidah (2013). telah melakukan penelitian dengan judul Skripsi Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Usaha Pasar Tradisional dan

Modern. Hasil penelitian tersebut adalah sebagai berikut :1) Dalam pengimplementasian kebijakan pemerintah Kota Lamongan secara teknis SKPD yang terkait tidak berjalan dengan baik khususnya di Kecamatan Karanggeneng yang jarak antara pasar modern dan tradisional sangat berdekatan. 2) Terdapat beberapa faktor yang mendukung dan mempengaruhi dalam implementasi kebijakan dalam penataan pasar modern dan tradisional di Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan. Yakni a) kebijakan Ideal. b) Kelompok sasaran (target group). c) Badan atau organisasi pelaksana. d) Faktor-faktor lingkungan.

Fiyal (2013). melakukan penelitian dengan judul "Implementasi Kebijakan Rencana Tata Kelola Ruang Wilayah Kota Surabaya". Hasil penelitian adalah setelah melalui beberapa tahap interpretasi hasil penelitian. analisa dan pembahasan hasil penelitian. maka kesimpulan yang dapat diambil berkenaan implementasi rencana tata ruang wilayah Surabaya (Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2007) sebagai kawasan lindung/konservasi laut di Boozem Monokrembang sebagai berikut:a. Implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Surabaya (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007) sebagai kawasan lindung di Boozem Monokrembang ini belum optimal. Kendala belum optimalnya implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah Surabaya (Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007) Sebagai kawasan lindung di Boozem Monokrembang adalah kurangnya Pemerintah Daerah dalam mensosialisasikan Perda tersebut dan kesadaran masyarakat sekitar untuk menjaga dan tidak membuang sampah di boozem.

Penelitian trdahulu tersebut di atas menjadi referensi dalam penelitian ini. Ada beberapa konsep yang akan diakomodir untuk memperkuat analisis dalam pembahasan hasil penelitian. Perbedaan penelitian yang diteliti dengan beberapa penelitian terdahulu adalah penelitian ini lebih memfokuskan pada Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah, mencakup tiga aspek dalam implementasi kebijakan yaitu aspek organisasi, aspek interpretasi, seerta aspek aplikasi.

C. Kerangka Berfikir

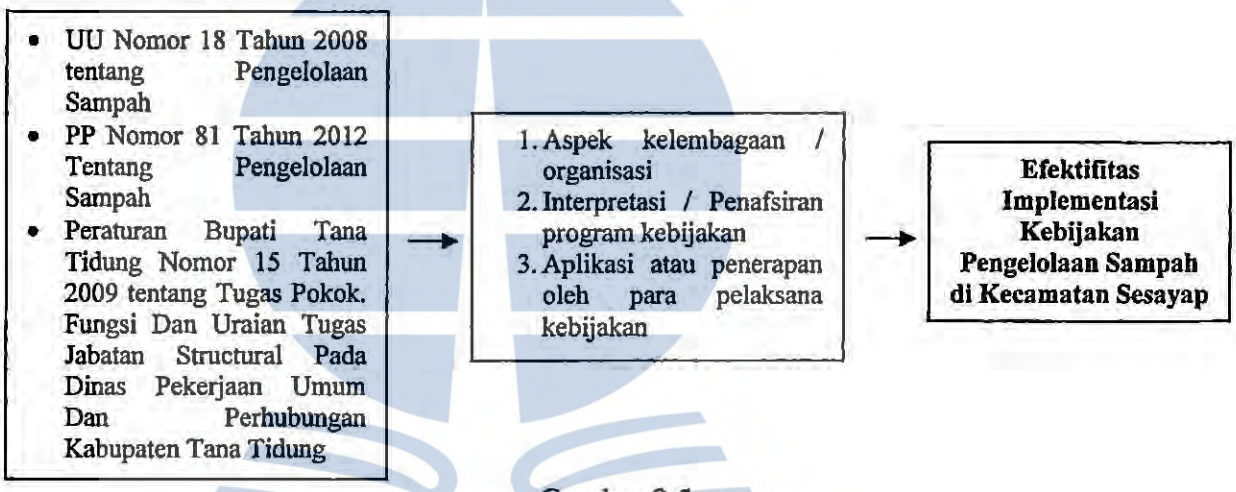

Gambar 2.5
Kerangka Berfikir Penelitian
Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah
di Kecamatan Sesayap KabupatenTana Tidung

D. Operasionalisasi Konsep

Dari rangkaian teori mengenai implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh pakar pada pembahasan sebelumnya, maka penulis menyandarkan diri pada teori yang dikemukakan oleh Charles O. Jones mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam

implementasi kebijakan publik. yaitu *organization. interpretation. and application.*

Program pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung. merupakan salah satu program kerja Bidang Tata Ruang. Kebersihan dan Pertamanan Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. Dalam pelaksanaan strategi menggalakkan kesadaran hidup bersih dan membuang sanpah pada tempatnya. bukanlah pekerjaan yang mudah. Justru pekerjaan ini sangat rumit ditengah segala keterbatasan yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya.

Charles O. Jones mengemukakan teori implementasi kebijakan yang terdiri dari tiga aktivitas utama yang sangat penting dalam implementasi kebijakan publik. yaitu *organization. interpretation. and application.* Selengkapnya Jones mengemukakan bahwa:

> *Implementation is that set of activities directed toward putting a program into effect. three activities. in particular. are significant :*
> 1. *Organization: the establishment or rearrangement of resources. unit and methods for putting a policy into effect*
> 2. *Interpretation: the translation of program language (often contaned in a statute) into acceptable and feasible plans and directives*
> 3. *Application: the routine provision of service. paymens. or other agree upon objectives of instruments.*
>
> (Jones. 1984:166)

Berdasarkan teori tersebut maka dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga aktivitas utama yang sangat penting. Aktivitas yang pertama adalah organisasi pelaksana kebijakan. yang mencakup pembentukan atau penataan kembali sumber daya. unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.

Kemudian aktivitas yang kedua adalah interpretasi para pelaksana

kebijakan. yaitu aktivitas pelaksana kebijakan yang menafsirkan agar program (seringkali dalam hal status) menjadi rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Terakhir. aktivitas yang ketiga adalah aplikasi atau penerapan oleh para pelaksana kebijakan yang mencakup ketentuan rutin dari pelayanan. pembayaran. atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan dan perengkapan program dari kebijakan publik yang telah ditentukan.

Bertumpu pada apa yang dikemukakan Jones tersebut. maka masalah implementasi kebijakan publik semakin lebih jelas dan luas. dimana implementasi itu merupakan proses yang memerlukan tindakan-tindakan sistematis yang terdiri dari organisasi. interpretasi dan aplikasi.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Menurut Sugiyono (2009:15) penelitian kualitatif adalah suatu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamih dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara puposive, teknik pengumpulan denan triangulasi, analisis data bersifat induktif kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian kualitatif bertumpu pada latar belakang alamiah secara holistik, memposisikan manusia sebagai alat penelitian, melakukan analisis data secara induktif, lebih mementingkan proses daripada hasil serta hasil penelitian yang dilakukan disepakati oleh peneliti dan subjek penelitian.

Dipilihnya pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan pada alasan bahwa permasalahan yag dikaji di dalam penelitian ini memerlukan sejumlah data lapangan yang bersifat aktual dan konseptual. Di samping itu, pendekatan kualitatif lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi dan situasi yang berubah-ubah selama penelitian berlangsung (Moleong 2007:10)

Moleong mengatakan. penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek

penelitian (misalnya perilaku. persepsi. tindakan. dan lainnya) secara holistik. dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. Itulah alasan mengapa peneliti mengambil penelitian menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif.

Bogdan dan Taylor (1975:5), seperti yang dikutip oleh Moleong (2004:3), mendefinisikan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif memiliki 5 (lima) ciri menurut Bogdan dan Biklen (1982:31) seperti yang dkukutip oleh Hasan (1990:69) yaitu *Natural Setting* dikumpulkan dari alam nyata dalam situasi sebagaimana apa adanya dengan peneliti sebagai instrument kunci, bersifat deskriptif, lebih mengutamakan proses dari pada hasil, analisis data secara induktif dan meaning (makna) merupakan perhatian utamanya.

Penelitian kualitatif besifat deskriptif, artinya data yang dianalisa dan hasil-hasil berbentuk deskriptif fenomena, tidak berupa angka-angka atau koefisien tentang hubungan antar variabel (Hasan, 1990:40). Singarimbun (1995:4) mengatakan bahwa penelitian deskriptif dimaksudkan untuk melakukan pengukuran yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu. Peneliti mengembangkan konsep dan menghimpun fakta tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa. Oleh karena itu penelitian ini tidak menggunakan hipotesis tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala dan keadaan disertai dengan interpretasi. Selain itu penelitian ini juga menggunakan wawancara

sebagai alat pengumpulan data. Penelitian ini tidak hanya terbatas pada pengumpulan data tetapi juga meliputi analisis dan interprestasi dari arti data yang telah diambil.

Dengan demikian melalui penelitian deskriptif kualitatif ini hanya berusaha untuk menggambarkan permasalahan yang ada dalam kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. dan kemudian menganalisanya sampai pada suatu kesimpulan absolut.

B. Fokus Penelitian

Di dalam penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas atas dasar masalah penelitian. "Masalah dalam penelitian kualitatif dinamakan fokus" (Moleong 2002:62). pemikiran fokus meliputi perumusan latar belakang. studi dan permasalahan. ini berarti fokus adalah penentuan keluasan permasalahan dan batas penelitian. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut karena penelitian kualitatif tidak dimulai dari yang kosong atau adanya masalah. baik masalah yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengamatan pengetahuannya yang di peroleh melalui kepustakaan ilmiah. "Jadi fokus dalam penelitian kualitatif bersifat tentatif. artinya penyempurnaan rumusan fokus atau masalah itu masih tetap dilakukan sewaktu peneliti sudah berada di latar penelitian" (Moleong 2002: 63).

Penelitian ini difokuskan pada perumusan masalah bagaimana pengelolaan sampah dan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap yang meliputi aspek organisasi, interpretasi, dan aplikasi.

Peneliti mengambil lokasi penelitian di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada alasan potensi timbunan sampah yang dihasilkan di Kecamatan Sesayap cenderung lebih besar daripada kecamatan-kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Tana Tidung serta penanganan pengelolaan sampah yang masih berpusat di Kecamatan Sesayap itu sendiri.

C. Sumber Informasi dan Pemilihan Informan

Di dalam penelitian ini penulis memilih informan dan berbagi sumber yang terkait dengan pengelolaan sampah khususnya di Kecamatan Sesayap, informasi diambil dari orang-orang yang dipilih oleh peneliti yang berperan sebagai narasumber dan partisipan. Dengan pertimbangan, bahwa informan tersebut sepenuhnya terlibat dalam kasus pada situasi sosial yang hendak diteliti.

Ada beberapa Informan dan Informan kunci yang menjadi sumber Informasi penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1) Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung;
2) Kepala Bidang Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan, Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung;

3) Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan. Bidang Tata Ruang. Kebersihan. dan Pertamanan. Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung;
4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan;
5) Petugas Lapangan. yang terdiri dari Petugas Kebersihan Pasar. Penyapu Jalan. Petugas Pembersih Parit dan Rumput. Petugas Pengangkut Sampah. Petugas Pemelihara TPA. Pengawas Lapangan. dan Supir.
6) Unsur masyarakat seperti pedagang pasar. kios-kios. warung makan. warga perumahan. sekolah. dan lain-lain.

D. Instrumen Penelitian

Sugiyono (2005:305) menyatakan bahwa "terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen utamanya adalah peneliti sendiri, namun selanjutnya setelah focus penelitian menjadi jelas, maka kemungkinan akan dikembangkan instrument penelitian sederhana, yang diharapkan dapat melengkapi data dan membandingkan dengan data yang telah ditemukan melalui :

1. Teknik Observasi

Observasi (pengamatan) di lokasi-lokasi sebaran Tempat Pembuangan Sampah (TPS) dan Tempat Pembuangan Akhri (TPA) yang ada di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, serta Dinas terkait dimaksudkan untuk

memperoleh informasi serta gambaran empiris tentang data-data yang diperlukan itu. Observasi meliputi segala hal yang menyangkut pengamatan aktivitas ataupun kondisi perilaku.

2. Teknik Wawancara

Teknik wawancara dimaksudkan untuk mengumpulkan data primer yang dilakukan melalui wawancara secara mendalam (Indepth interview) dengan mengacu pada pedoman wawancara sebagai penuntun bagi peneliti dalam mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka kepada informan yang ditentukan. Informan diberi kebebasan yang seluas-luasnya untuk menyampaikan pendapat suatu gejala, fenomena dan situasi.

3. Teknik Dokumentasi

Selain menggunakan teknik di atas yaitu wawancara dan observasi, dilakukan pula teknik dokumentasi dimaksudkan untuk mengumpulkan data sekunder diperoleh melalui cara mengumpulkan berbagai dokumentasi tertulis (peraturan perundang-undangan, surat keputusan, dan ketentuan lainnya) sebagai bahan referensi dan komparasi.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh penulis dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dipergunakan alat pengumpulan data menggunakan wawancara. Panduan wawancara, digunakan sebagai alat dalam melakukan wawancara agar dapat lebih terfokus dan konsisten.

E. Prosedur Penelitian

Data merupakan salah satu faktor yang sangat menunjang bahkan pendukung utama dalam suatu penelitian. Menurut Lofland dan Lyn (Moleong, 2001:112) sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.

Arikunto (2006:129) menyebutkan bahwa : " sumber data adalah subjek dari mana dapat diperoleh " sedangkan menurut Sugiyono (2007:156) bahwa " bila dilihat dari sumber datanya maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder". oleh karena itu data yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian ini diperoleh dari berbagai data baik data primer maupun data sekunder dimana :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau informan, baik yang dilakukan melalui wawancara maupun pengamatan langsung oleh penulis yang sifatnya relative lebih subyektif karena terbentuk persepsi pribadi. Pada penelitian ini penulis menggunakan data primer yang berasal dari hasil wawancara dengan informan *(sample)* yang penulis tentukan untuk penelitian ini. Data primer merupakan data hasil dari wawancara maupun data tertulis yang merupakan hasil penelitian di lapangan yang dilakukan secara terstruktur. Dalam wawancara terstruktur terlebih dahulu dipersiapkan instrumen yang berupa daftar pertanyaan yang berfungsi sebagai pedoman pada saat wawancara berlangsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang bersifat menunjang penelitian, diperoleh dari dokumen-dokumen resmi yang digunakan untuk melengkapi data primer. Data-data tersebut seperti : buku-buku teoritis, makalah-makalah ilmiah, laporan-laporan, arsip-arsip, dan berbagai aturan dengan berbagai variabel yang diteliti yaitu Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung.

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan langsung berhadapan dengan narasumber sebagai sumber data primer. Sedangkan perolehan data juga diperoleh dari sumber data yang tidak langsung kepada peneliti, misalnya dalam bentuk dokumen sebagai sumber data sekunder. Maka prosedur pengumpulan data dapat dilakukan penelitian melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

F. Metode Analisis Data

Pengolahan data dan analisis dilakukan melalui pemilahan data, kategorisasi, pendalaman, penggunaan contoh, membandingkan dan verifikasi. Deskripsi disajikan secara naratif, berupa teks, bagan maupun tabel. Setelah naskah penelitiian tersusun dalam bentuk draft, peneliti menganggap perlu untuk meminta umpan balik terlebih dahulu kepada sumber informasi untuk memperoleh kesahihan (Miles dan Huberman, 1992)

Menurut Miles dan Huberman (Sugiono, 2007:21) analisis meliputi tiga langkah, yaitu :

1. Reduksi Data *(Data Reduction)*

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya serta mencarinya bila diperlukan.

2. Penyajian Data *(Data Display)*

Setelah data reduksi, langkah selanjutnya adalah menyajikan data tersebut untuk mempermudah dalam memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart, dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan "yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif".

3. Penarikan Kesimpulan *(Conclusion Drawing and Verification)*

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Sejalan dengan penjelasan diatas, kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi

mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Objek Penelitian

1. Gambaran Umum Kabupaten Tana Tidung.

Kabupaten Tana Tidung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, yang disetujui pembentukannya pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007.Kabupaten ini merupakan pemekaran dari 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia.Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur.Kabupaten Tana Tidung Ibu Kotanya adalah Tideng Pale.

Pada tanggal 17 Februari 2016, DR. Drs. H. Undunsyah, M.Si, MH dilantik menjadi Bupati Tana Tidung dengan didampingi oleh Markus, SE sebagai Wakil Bupati. Saat ini, Tideng Pale betul-betul difungsikan menjadi pusat Pemerintahan, dimana seluruh Dinas, Badan, dan Kantor yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung berkantor di Desa Tideng Pale. Selain itu, beberapa instansi vertikal seperti Kantor Urusan Agama (Kementerian Agama), dan Badan Pusat Statistik (BPS).

2. Visi Misi Kabupaten Tana Tidung.

Visi Kabupaten Tana Tidung adalah : "PEMERATAAN INFRASTRUKTUR WILAYAH UNTUK PENGUATAN LAYANAN DASAR

DAN MENUJU KETAHANAN PANGAN DALAM RANGKA PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DAN DAYA SAING DAERAH YANG MANDIRI."

Sementara itu, untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Kabupaten Tana Tidung mempunyai Misi sebagai berikut :

1) Peningkatan Kualitas Pelayanan Dan Mutu Pendidikan;
2) Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
3) Penanggulangan Kemiskinan;
4) Peningkatan Kualitas Pelayanan Infrastruktur;
5) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Sanitasi Dan Air Bersih;
6) Peningkatan Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang Dan Lingkup Hidup;
7) Pengembangan Agroindustri;
8) Peningkatan Daya Saing Ekonomi Lokal;
9) Peningkatan Pariwisata Dan Kebudayaan Daerah;
10) Peningkatan Kualitas Sadar Hukum Masyarakat;
11) Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Dan Reformasi Birokrasi.

Berdasarkan Visi & Misi tersebut, diharapkan terwujudnya semboyan Masyarakat Kabupaten Tana Tidung yang "BERJUANG", (BERSIH : Lingkungan yang bersih, sehat, dan asri; JUJUR : Suasana kehidupan yang berlandaskan karakter moral yang positif, berbudi luhur, saling menghargai dan mengayomi; AMANAH : Pelaksanaan Tata Kelola Pemerintahan yang

berlandaskan kehendak rakyat demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera; GOTONG ROYONG : Terbentuknya rasa kebersamaan seluruh lapisan masyarakat dalam membangun dan memajukan Kabupaten Tana Tidung ."

Secara geografis wilayah Kabupaten Tana Tidung terletakpada koordinat 116°42°50 s/d117°42°50 Bujur Timur dan 3°12°02s/d3°46°41 Lintang Selatan terletak di wilayah dataran tinggi. Luas wilayah keseluruhan Kabupaten Tana Tidung 4.801,68 km^2, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Nunukan;
- Sebelah Timur : Laut Sulawesi, Kabupaten Bulungan, dan Kota Tarakan;
- Sebelah Barat : Kabupaten Malinau;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Bulungan.

Wilayah Kabupaten Tana Tidung terdiri atas 5 kecamatan dengan luas total 4.828,58 Km^2 atau sekitar 26,81% dari luas wilayah Kabupaten Bulungan sebelum dimekarkan (18.010,50 Km^2). Ibukota Kabupaten Tana Tidung berkedudukan di Tideng Pale, Kecamatan Sesayap. Wilayah administrasi Kabupaten Tana Tidung terdiri atas 5 (lima) kecamatan dan 33 (tiga puluh tiga) desa, dengan rincian sebagai berikut :

1. Kecamatan Sesayap, luas wilayah sekitar 1.016,92 Km^2 membawahi 7 Desa, yaitu Desa Tideng Pale, Limbu Sedulun, Sebidai, Sedulun, Tideng Pale Timur, Gunawan dan Sebawang.
2. Kecamatan Sesayap Hilir, luas wilayah sekitar 1.317,53 Km^2 membawahi 9 Desa (21RT), yaitu Desa Sesayap, Sengkong, Bebatu,

Bandan Bikis, Sepala Dalung, Seludau, Menjeletung, dan Selor.

3. Kecamatan Tana Lia, dengan luas 877,86 Km² membawahi 5 Desa, yaitu : Tana Merah, Tengku Dacing, Sambungan, Tanah Merah Barat, Sambungan Selatan.
4. Kecamatan Betayau, dengan luas 1.107,65 Km² membawahi 6 Desa, yaitu Desa Buong Baru, Bebakung, Kujau, Mendupo, Maning, dan Periuk.
5. Kecamatan Muruk Rian, dengan luas 608,62 Km² membawahi 6 Desa, yaitu Seputuk, Rian, Balayan Ari, Rian Rayo, Kapuak, dan Sapari.

Tabel 4.1
PembagianWilayah Administrasi
Kabupaten Tana Tidung

No	Nama Kecamatan	Banyaknya		Luas (Km^2)
		Desa	RT	
1	SESAYAP	7	27	1.116,92
2	SESAYAP HILIR	9	28	1.317,53
3	TANA LIA	5	18	877,86
4	MURUK RIAN	6	12	608,62
5	BETAYAU	6	19	1.007,65
JUMLAH		**33**	**104**	**4.828,58**

Sumber: Peraturan Daerah Kabupaten Tana TIdungNomor 10 Tahun 2012

Kabupaten Tana Tidung merupakan daerah yang memiliki keragaman bentuk, baik di daratan maupun di perairannya. Kondisi yang demikian ini ternyata mempunyai hubungan yang erat dengan aktivitas manusianya, satu ciri utama kajian geografis adalah hubungan antara fisik dan unsur sosial ekonomi dalam wilayah atau kawasan tertentu.

Aktivitas penduduk di suatu daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi geografis terutama kondisi fisiknya. Kondisi geografis fisik tersebut meliputi kondisi iklim, topografi, jenis kualitas tanah serta kondisi perairan. Pemanfaatan lingkungan fisik oleh manusia pada hakekatnya tergantung pada kondisi lingkungan fisik itu sendiri dan kualitas manusianya, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam memanfatkan kondisi lingkungan fisik untuk kesejahtraan hidup masyarakatnya.

Kondisi geografis wilayah Kabupaten Tana Tidung yang bervariasi menyebabkan keragaman sumber daya alam, baik sumber daya alam sector pertambangan maupun sumber daya alam hayati baik perikanan, peternakan, maupun pertanian. Saat ini Pemda Kabupaten Tana Tidung tengah berupaya meningkatkan pemanfaatan gas alam guna pemenuhan kebutuhan akan sumber tenaga listrik yang semakin hari semakin meningkat.

Disamping itu, sektor perikanan, petanian, maupun peternakan yang pada dasarnya merupakan sumber mata pencaharian utama masyarakat Kabupaten Tana Tidung sejak dahulu, hingga saat ini tetap masih menggeliat meskipun perlu usaha dan terobosan-terobosan baru guna meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat yang berkecimpung di sektor ini.

Salah satu sektor yang menjadi andalan Kabupaten Tana Tidung karena faktor geografisnya adalah pariwisata. Keberadaan gunung-gunung, hutan-hutan yang masih alami dan kekayaan alam lainnya menjadi modal yang baik bagi dikembangkannya sektor pariwisata. Pengembangan pariwisata ke depan, tidak hanya mengandalkan kekayaan hayati, namun juga harus disinergikan dengan

kondisi sosial dan budaya setempat, sehingga dapat menjadi nilai tambah. Selain itu, guna menambah pendapatan daerah maupun dalam upaya promosi daerah melalui potensi wisata, Kabupaten Tana Tidung juga gencar memaksimalkan pelestarian budaya dengan tujuan untuk memperkenalkan Kabupaten Tana Tidung ke seluruh Indonesia. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan acara-acara betrtajuk kebudayaan yang diselenggarakan hampir setiap bulan di Kabupaten Tana Tidung, maupun dengan turut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan budaya yang diselenggarakan di daerah lain.

Jika dilihat dari jumlah penduduk, Kecamatan Sesayap merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terbanyak dibandingkan dengan 4 kecamatan lainnya. Jumlah penduduk Kecamatan Sesayap pada tahun 2015 sebanyak 10.566 jiwa atau sebesar 44,02% dari total 24.002 jiwa penduduk Kabupaten Tana Tidung. Kecamatan Sesayap Hilir berada pada urutan berikutnya dengan jumlah penduduk sebanyak 6.211 jiwa (25,88%), disusul Kecamatan Tana Lia sebanyak 3.224 jiwa (13,43%), Kecamatan Betayau sebanyak 2.580 jiwa (10,75%), dan Kecamatan Muruk Rian di urutan terakhir dengan jumlah penduduk sebanyak 1.421 jiwa atau sebesar 5,92%. Pada tabel berikut, dapat dilihat perbandingan penduduk masing-masing kecamatan.

Tabel 4.2
Jumlah Penduduk masing-masing kecamatan berdasarkan jenis kelamin

No	Nama Kecamatan	Jenis Kelamin		Jumlah	%
		L	P		
1	Sesayap	5.649	4.917	10.566	44.02
2	Sesayap Hilir	3.328	2.883	6.211	25.88
3	Tana Lia	1.768	1.456	3.224	13.43
4	Betayau	1.357	1.223	2.58	10.75
5	Muruk Rian	743	678	1.421	5.92
Jumlah		**12.845**	**11.157**	**24.002**	**100**

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Tidung bulan Desember 2015

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas masyarakat. pasti akan menimbulkan berbagai permasalahan di wilayah tersebut. Salah satu permasalahan yang dapat timbul di wilayah tersebut adalah masalah potensi sampah. Sampah adalah barang atau benda yang dibuang karena tidak terpakai lagi. Masalah ini juga menjadi tidak terelakkan khususnya di wilayah Kecamatan Sesayap sebagai poros kegiatan ekonomi masyarakat maupun pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung.

Potensi sampah di Kecamatan Sesayap merupakan suatu istilah yang menggambarkan seberapa besar sampah yang dihasilkan, baik oleh setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah di Kecamatan Sesayap. Besar potensi sampah tersebut diperoleh dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga (tidak termasuk tinja), sampah spesifik, sejenis sampah rumah tangga berasal dari kawasan komersial, kawasan perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum dan fasilitas lainnya. Sementara itu, untuk menanggulangi potensi sampah yang ada di Kecamatan Sesayap, teknis operasional pengelolaannya

masih dilakukan melalui cara yang sederhana yaitu kumpul-angkut-buang. Hal ini dikarenakan sistem belum adanya regulasi yang jelas serta berlum tersedianya TPA untuk memproses sampah.

1. Pengumpulan

Pada tahap pengumpulan, pengumpulan sampah dilakukan petugas terhadap tempat-tempat sampah yang telah disediakan dengan memasukkan isi tong-tong sampah tersebut ke *dump truck.*

2. Pengangkutan

Pengangkutan merupakan tahap sebelum sampah diangkut ke sarana pembuangan atau pengolahan akhir. Jenis kendaraan pengangkut sampah yang ada di Kabupaten Tana Tidung pada saat ini seperti *dump truck* dan *sepeda motor gerobak.*

3. Pembuangan.

Tahap akhir dari proses pengelolaan sampah dilakukan dengan membuang sampah yang telah terkumpul ke suatu tempat terbuka yang telah disediakan. Pada dasarnya tempat pembuangan akhir ini adalah sebuah lahan kosong yang disewa oleh Pemda terletak agak jauh dari perkampungan warga.

Dari keseluruhan 7 desa yang berada di wilayah Kecamatan Sesayap, sebanyak 6 desa sudah terlayani program pengelolaan persampahan yakni Desa Tideng Pale, Desa Tideng Pale Timur, Desa Sedulun, Desa Limbu Sedulun, Desa Sebidai, dan Desa Sebawang. Sementara untuk Desa Gunawan belum dapat terlayani. Desa Gunawan merupakan desa yang jaraknya paling jauh dengan pusat

Kecamatan Sesayap dibandingkan dengan desa-desa lainnya di wilayah Kecamatan Sesayap yakni lebih kurang berjarak 9 km dari Desa Tideng Pale.

3. Struktur Organisasi, Kedudukan dan Tupoksi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung.

Struktur organisasi merupakan suatu sistem yang terencana mengenai usaha kerjasama dimana setiap orang yang berada di dalamnya mempunyai peranan yang diakui untuk menjalankan tugas dan fungsi, pada struktur dapat diketahui dengan jelas tentang isi dari luasnya kegiatan-kegiatan yang berlangsung dalam organisasi bersangkutan.

Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung memiliki struktur organisasi sebagai berikut :

Bagan 4.1
Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan
Kabupaten Tana Tidung

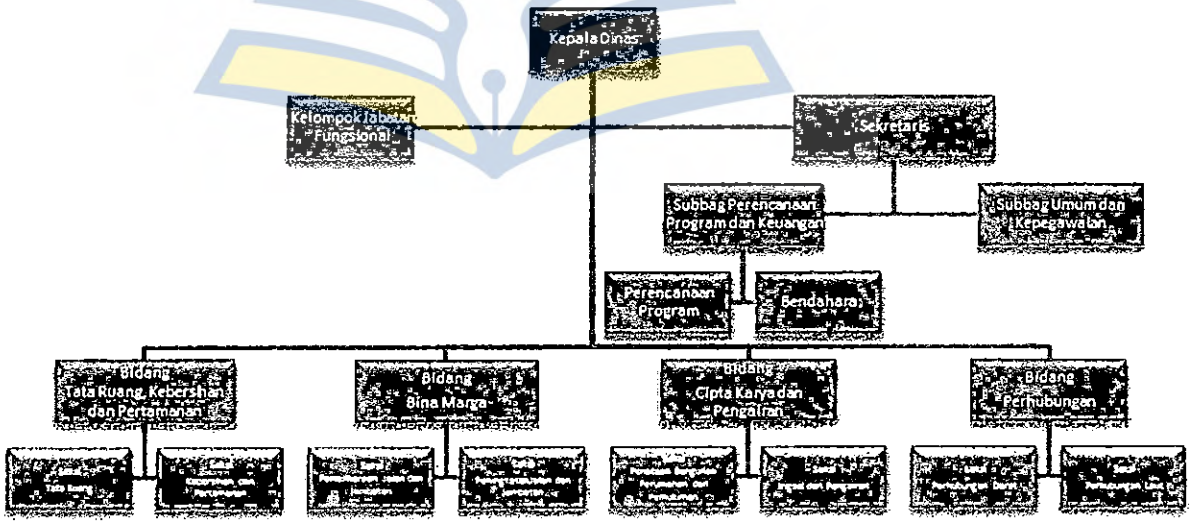

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung

Struktur organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung tersebut didasarkan pada Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok. Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. Adapun organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung terdiri dari :

1. Kepala Dinas,
2. Sekretaris,
    a. Sub Bagian Perencanaan Program Dan Keuangan,
        - Perencanaan Progam,
        - Bendahara,
    b. Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian,
3. Bidang Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan,
    a. Seksi Tata Ruang,
    b. Seksi Kebersihan Dan Pertamanan
4. Bidang Bina Marga,
    a. Seksi Pemeliharaan Jalan Dan Jembatan,
    b. Seksi Peningkatan Jalan Dan Jembatan,
5. Bidang Cipta Karya Dan Pengairan,
    a. Seksi Penataan Bangunan Perumahan Dan Pemukiman,
    b. Seksi Irigasi Dan Pengairan,
6. Bidang Perhubungan,
    a. Seksi Perhubungan Darat,

b. Seksi Perhubungan Laut,

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung secara menyeluruh termasuk di wilayah Kecamatan Sesayap masih sepenuhnya dikelola oleh Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung melalui Bidang Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan berdasarkan Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok. Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan rencana kerja dan program kerja;
2. Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran;
3. Mengkoordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran
4. Melaksanakan kebijakan umum dan teknis dibidang kebersihan dan pertamanan
5. Melaksanakan peningkatan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian kebersihan dan pertamanan
6. Melakukan koordinasi keberhan jalan dan lingkungan, pemusanahan dan pemanfaatan sampah serta air kotor
7. Melakukan pengelolaan pembibitan dan penghijauan, pembangunan dan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan pertamanan
8. Melakukan analisis dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

9. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan guna kelancaran pelaksanaan kegiatan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Berdasarkan hasil dokumentasi yang diperoleh penulis, Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan terdiri dari 5 orang PNS dengan urutan struktur sebagai berikut :

1). Kepala Bidang membawahi 2 Kepala Seksi (Kasie);

2). Kepala Seksi Tata Ruang membawahi 1 orang staf;

3). Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan membawahi 1 orang staf.

B. Hasil Dan Pembahasan.

Pencapaian tujuan kebijakan tidak mungkin dapat terwujud apabila dilakukan hanya oleh pemerintah saja. Artinya, pemerintah daerah perlu meningkatkan sumber daya untuk memperkuat institusi lokal. Kinerja implementasi kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya dari standar dan tujuan kebijakan yang bersifat realistis dengan sosio-kultur yang ada pada tahap pelaksanaan kebijakan. Ketika standar dan sasaran kebijakan terlalu ideal, maka sulit untuk direalisasikan. Van Meter dan Van Horn (1975 : 473) mengemukakan bahwa untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan tentunya perlu menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan. Kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dapat dievaluasi dari sudut kemampuannya secara nyata dala mengoperasionalkan kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Sebaliknya, keseluruhan proses implementasi kebijakan dapat dievaluasi dengan cara mengukur atau membandingkan antara hasil akhir dari program-program tersebut dengan tujuan-tujuan kebijakan (Wahab, 2008:179).

Tujuan dan sasaran suatu kebijakan yang dilaksanakan harus diidentifikasi dan diukur, karena implementasi tidak dapat berhasil atau mengalami kegagalan apabila tujuan tersebut tidak dipertimbangkan. Dalam menentukan ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran, dapat dipergunakan pernyataan-pernyataan dari pembuat keputusan sebagaimana direfleksikan dalam banyak dokumen sperti garis-garis pedoman program yang menyatakan kriteria untuk evaluasi terhadap efektivitas implementasi kebijakan. Namun demikian, Dalam beberapa hal ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan harus dideduksikan oleh peneliti, yang pada akhirnya pilihan ukuran-ukuran pencapaian tergantung pada tujuan-tujuan yang didukung oleh penelitian.

Kebijakan pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung tidak terlepas dari rangkaian konsep dan asumsi yang digunakan sebagai landasannya. Berdasarkan isi peraturan perundangan yang telah diberlakukan, kerangka pemikiran yang digunakan untuk menetapkan kebijakan pelayanan pengelolaan sampah, yaitu merubah paradigma pengelolaan sampah saat ini yang masih "kumpul-angkut-buang" dan sampah yang masih dianggap sebagai limbah atau musuh yang harus dibuang, menjadi "sampah sebagai sumber daya" yang

dapat diolah, sehingga menghasilkan pendapatan dan menjadi peluang kesempatan kerja bagi masyarakat serta meningkatkan minat/peran dunia usaha dalam pengelolaan sampah.

Berdasarkan pemikiran tersebut, keberhasilan implementasi kebijakan pelayanan pengelolaan sampah sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah daerah untuk menghasilkan peraturan kerja yang tepat dan kemampaun para pengelola persampahan dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan kebijakan merupakan salah satu hal untuk menilai sejauh mana ukuran-ukuran dan tujuan kebijakan telah direalisasikan.

Seperti diketahui bahwa jumlah penduduk Indonesia yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi, mengakibatkan bertambahnya volume sampah. Disamping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan sulit diurai oleh proses alam. Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk atau pun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari hulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan

secara aman. Penngelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pemerintah dalam rangka mencapai tujuan implementasi kebijakan, berupaya melakukan tindakan yang berupa penghimpunan sumber daya dan penyediaan sumber daya. Hasil yang diperoleh dari tindakan yang pertama dapat disebut input kebijakan. Sementara itu, tindakan yang kedua dapat disebut sebagai proses kebijakan. Intinya, bahwa suatu organisasi dalam upaya mencapai tujuan (*goals*), yang *output*-nya dapat berupa jasa pelayanan, kemampuan-kemampuan, maupun program-program, selain memerlukan struktur dan kultur organisasi, perlu juga memiliki sumber daya (*resources*). Sumber daya tersebut diposisikan sebagai inputs dalam organisasi sebagai suatu sistem, yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis. Secara ekonomis *resources* bertalian dengan biaya (pengorbanan) langsung yang dikeluarkan oleh organisasi dan merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam *outputs*.

Implementasi kebijakan publik *(public policy implementattion,)* merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik *(public policy process).* Lebih jauh Jones (1984 : 12) mengartikan implementasi kebijakan publik sebagai : *"getting the job done "and" doing it."* Namun demikian, menurut Jones bahwa dalam implementasi kebijakan publik menuntut adanya syarat antara lain, adanya orang

atau pelaksana, uang, dan kemampuan organisasional, yang mana hal ini sering disebut dengan *resources*. Jones (1984:13) merumuskan batasan implementasi sebagai *"a process of getting additional resources* so as *to figure out what is to be done."* Implementasi dalam hal ini merupakan proses mendapatkan sumberdaya tambahan, sehingga dapat menghitung apa yang harus dikerjakan. Apa yang dikemukakan oleh Jones tentang implementasi tersebut di atas, merupakan suatu tahap dari suatu kebijakan yang paling tidak memerlukan dua macam tindakan yang berurutan. *Pertama*, merumuskan tindakan yang akan dilakukan; *Kedua*, melaksanakan tindakan apa yang telah dirumuskan tersebut. Agar dapat terimplementasi dengan baik apa yang menjadi tujuannya seperti yang telah dirumuskan maka kebijakan publik perlu dipersiapkan dengan baik.

Keberhasilan implementasi kebijakan itu dapat dilihat dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, yang oleh Charles O. Jones (1996:296) dikemukakan bahwa terdapat tiga kegiatan yang menjadi pilar dalam implementasi kebijakan yaitu : **1). *Organization; 2). Interpretaton; 3). Aplication.***

1 Aspek Organisasi

Organisasi dalam konteks implementasi kebijakan merupakan aktivitas membentuk badan-badan, unit-unit, beserta metode-metode yang diperlukan guna mencapai tujuan yang terkandung di dalam kebijakan. Organisasi merupakan kesatuan orang-orang yang melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup administrasi. Charles O. Jones (1984:176) mengemukakan bahwa "*the point is that implementation of policy may very depending on the particular*

stageofagency development." Setiap kegiatan memerlukan birokrasi yang mampu berkomunikasi dengan pihak yang membuat kebijakan dan juga dengan pihak yang melaksanakan kebijakan. Tujuan organisasi adalah menjalankan program- program yang telah dirancang.

Aktivitas dalam organisasi *(to organized)* menurut Jones (1984:20) adalah "Sebagai kegiatan yang bertalian dengan pembentukan atau penataan kembali sumber daya, unit-unit serta metode-metode yang mengarah pada upaya merealisasikan kebijakan menjadi hasil (outcomes) sesuai tujuan/sasaran program (menjadikan program berjalan)

Dalam implementasi kebijakan, pemerintah melakukan tindakan yang berupa penghimpunan & penyediaan sumber daya yang diposisikan dalam sistem organisasi 5 daya *(the Six M)* sebagai input dalam organisasi/kebijakan yang mempunyai implikasi yang bersifat ekonomis. Secara ekonomis resources, bertalian dengan biaya (pengorbanan) langsung yang dikeluarkan oleh organisasi dan merefleksikan nilai atau kegunaan potensial dalam transformasinya ke dalam output.

Kedua, sebagai proses kebijakan yakni dalam upaya mencapai tujuan *(goals),* yang output-nya: jasa pelayanan, kemampuan-kemampuan, program-program, yang dijalankan dalam struktur dan kultur organisasi.

Dalam implementasi kebijakan, organisasi juga mencakup pola-pola wewenang formal dan informal, pembagian kerja diantara berbagai komponen, saluran-saluran komunikas, ketepatan dalam penentuan fungsi dan wewenang masing-masing unit/bagian, pengisian personal, pola hubungan antar unit dan

lembaga terkait agar struktur yang ada mampu untuk merespon dan mengadaptasi dengan perkembangan lingkungan yang ada, serta mampu memecahkan masalah.

Implementasi kebijakan memerlukan suatu organisasi pelaksana yang dapat menjalankan dan mengontrol pelaksana kebijakan tersebut. Para pelaksana kebijakan mungkin tahu apa yang harus dikerjakan dan memiliki keinginan dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakannya, serta berbagai hambatan yang mungkin menghalangi implementasi kebijakan. Beberapa faktor yang dapat menghambat efektifitas implementasi dalam derajat dimensi organisasi misalnya keterbatasan anggaran, keterbatasan personel, metode pelaksanaan (petunjuk pelaksaanaan, petunjuk teknis) yang belum baku, hingga koordinasi antar pelaksana implementasi dalam suatu organisasi.

Penataan sumber daya dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap dititikberatkan pada Seksi Kebersihan dan Pertamanan. Segala keperluan dan urusan yang berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung secara umum diselenggarakan melalui Seksi Kebersihan dan Pertamanan.

Keterbatasan kuantitas implementor (yang mana hanya terdiri dari 1 orang kepala seksi dan 1 orang staf), mengakibatkan pembagian tugas antara jumlah petugas dan volume pekerjaan belum dapat dikatakan proporsional. Sebagaimana wawancara dengan informan [1]) yang menyatakan :

---

[1] Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016

"Pembagian personil untuk seksi kebersihan dan pertamanan belum dapat dikatakan proporsional bila dibandingkan antara jumlah pegawai dengan volume pekerjaan..."

Guna menyikapi masalah tersebut, Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung mempekerjakan sebanyak 91 orang petugas lapangan yang berstatus tenaga kontrak. Para tenaga kontrak tersebut dibagi menjadi beberapa kelompok dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

1) 5 orang petugas kebersihan pasar;
2) 5 orang pengawas lapangan;
3) 6 orang petugas pemelihara TPA,
4) 41 orang petugas penyapu jalan;
5) 16 orang petugas pengangkut sampah;
6) 10 orang petugas pembersih parit;
7) 4 orang petugas pembersih kantor;
8) 4 orang supir.

Melalui pola perekrutan tenaga kontrak tersebut diharapkan mampu memberikan dampak positif terhadap efektifitas pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung pada umumnya, khususnya wilayah Kecamatan Sesayap. Berdasarkan hasil observasi, dengan pembagian tugas-tugas tersebut masalah pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap dapat teratasi, meskipun hasilnya masih belum maksimal. Kondisi tersebut juga sesauai dengan hasil wawancara dengan informan [2]) yang menyatakan :

---

[2] Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016

"Untuk wilayah Kecamatan Sesayap jumlah personil yang dikerahkan sudah memadai..."

Demikian juga dengan pernyataan informan [3]) yang menyatakan :

"Jumlah petugas sudah cukup memadai karena cakupan wilayah operasi Kecamatan Sesayap tidak terlalu luas dan pekerjaannya juga tidak terlalu rumit.."

Kondisi berbeda ditemukan oleh penulis. Berdasarkan hasil observasi, meskipun dengan dukungan personil yang ada, masih ada saja penumpukan sampah di beberapa titik atau daerah tertentu di Kecamatan Sesayap, salah satu misalnya di daerah pasar. Terjadinya penumpukan sampah di area sekitar pasar, kondisi ini disebabkan koordinasi antar lembaga yang terkait belum berjalan efektif. Pasar Imbayud di Kecamatan Sesayap, yang merupakan satu-satunya pasar tradisional yang ada di Kecamatan Sesayap, dikelola oleh Disperindagkop Kabupaten Tana Tidung. Dari hasil wawancara penulis dengan informan [4]) diperoleh informasi bahwa ada keraguan dari para petugas lapangan untuk mengurus sampah di pasar dikarenakan kekhawatiran akan terjadinya tumpang tindih kewenangan antara Dinas PU dan Perhubungan dengan Disperindagkop Kabupaten Tana Tidung.

"Sampah-sampah yang berasal dari pasar, sebisanya kami angkut. Namun kami khawatir adanya tumpang tindih pekerjaan dengan Dinas Perindagkop mengenai urusan pasar ini..."

Lain halnya dengan kondisi yang ditemukan di Desa Gunawan, sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa dari 7 desa yang ada di wilayah Kecamatan Sesayap, baru 6 desa yang terlayani. Jika ukuran

---

[3] Hasil wawancara dengan petugas pengangkut sampah, 12 Mei 2016
[4] Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016

efektifitasnya melibatkan seluruh desa yang ada, maka kondisi ini belum dapat dikatakan memadai. Berdasarkan hasil observasi, untuk Desa Gunawan belum tersedia sarana prasarana pembuangan/pengelolaan sampah oleh Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung.

Salah satu faktor yang dapat menghambat efektifitas implementasi dalam derajat dimensi organisasi adalah belum adanya metode pelaksanaan (petunjuk pelaksaanaan, petunjuk teknis) yang baku. Tanpa SOP yang baku maka dapat mengakibatkan interaksi antar individu-individu dalam suatu struktur organisasi tidak berjalan efektif. Agar dapat berinteraksi dengan efektif masing-masing individu dapat berpartisipasi pada organisasi yang digabungnya. Dengan berpartisipasi masing-masing individu dapat untuk lebih mengetahui hal-hal yang harus dilakukan (Keith Davis, 1962; 15-19)

Adanya organisasi terbentuk karena dipengaruhi aspek-aspek seperti penyatuan visi dan misi serta mempunyai tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi dari sekelompok orang tersebut terhadap lingkungan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan [5]) diperoleh informasi bahwa :

> "Sampai dengan saat ini kita belum memiliki SOP yang mengatur mengenai pembagian tugas kepada para petugas lapangan. Petugas lapangan ditugaskan secara lisan saja dengan pengaturan jadwal yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan…"

Meskipun demikian, Seksi Kebersihan dan Pertamanan tetap berkomintmen untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah yang baik, hal ini diwujudkan dengan penyusunan 9 progam kerja unggulan untuk dilaksanakan

---

[5] Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016

pada tahun anggaran 2016. Berdasarkan hasil dokumentasi, untuk tahun 2016 khusus Seksi Kebersihan Dan Pertamanan sedang menjalankan program kerja Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan sebagaimana tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun anggaran 2016 sebagai berikut :

1. Raperda Persampahan;
2. Dana Pendamping Pembangunan TPA;
3. Dana Pendamping 3R;
4. Dana Pendamping IPAL Kawasan;
5. UKL/UPL Tempat Pembuangan Akhir;
6. Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan;
7. Pemeliharaan Kendaraan Operasional;
8. Belanja Alat Peralatan Kebersihan;
9. Belanja Bahan Bakar Kebersihan.

Dari kesembilan program kerja yang dirancang, program kerja unggulan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap adalah pembuatan Raperda Persampahan dan pembangunan TPA sebagaimana hasil wawancara dengan informan [6]) yang menyatakan :

> "Semua program disusun guna peningkatan efektifitas pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung pada umumnya. Namun yang jadi prioritas utama dan program kerja unggulan untuk tahun 2016 adalah Raperda Persampahan dan pembangunan Tempat Pembuangan akhir…"

---

[6] Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016

Berdasarkan pembahasan dari aspek organisasi, bahwa Organisasi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung menunjukkan bahwa organisasi yang menjadi wadah bagi implementasi pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap adalah tempat dimana kegiatan pengelolaan sampah dilaksanakan secara bergerak. Organisasi implementasi pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap memiliki suatu pola dasar struktur organisasi yang relatif permanen. Akan tetapi dengan adanya perkembangan-perkembangan, kompleksnya tugas-tugas, kurangnya personil yang berstatus pegawai negeri, serta petugas lapangan yang sifatnya sebagai tenaga kontrak yang sewaktu-waktu dapat diberhentikan secara mendadak, semuanya itu dapat menjadi faktor yang mendorong adanya perubahan-perubahan dalam organisasi implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap.

Kedudukan Dinas PU dan Perhubungan, melalui Seksi Kebersihan dan Pertamanan pada Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan sebagai birokrasi pelaksana dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap dalam hal ini sangat strategis. Jadi keberhasilan kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap sangat dipengaruhi oleh keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap itu sendiri. Sementara pihak yang paling menentukan keberhasilan implementasi kebijakan publik adalah aparatur birokrasi dalam organisasi pelaksana disamping sistem yang melingkupinya.

Selanjutnya penulis menganalisis dengan mengacu kepada pendapat Jones (1994 : 306), bahwa di dalam organisasi dalam implementasi kebijakan

memerlukan perintah atasan yang jelas dan tegas, dan perlu memberikan sanksi bagi aparat yang melanggar, maka di dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap, sebenarnya pemimpin pelaksana implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap seharusnya memberikan perintah yang diperlukan untuk mempertanggungjawabkan kewajiban-kewajiban tersebut dan kemudian dibagikan dalam cara yang tetap, serta dibatasi secara ketat oleh aturan-aturan yang berhubungan dengan sanksi, yang akan dikenakan bagi para pelaksana implementasi kebijakan yang melakukan pelanggaran. Jones selanjutnya mengemukakan bahwa "*the point is that implementation of policy may very depending on the particular stage of agency development*" maka kegiatan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap memerlukan organisasi yang mampu berkomunikasi dengan semua pihak yang terkait dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. Tujuan organisasi ini adalah menjalankan program-program yang telah dirancang untuk kepentingan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap.

2. Aspek Interpretasi

Jones (1984 : 34) mengemukakan bahwa interpretasi merupakan proses menafsirkan program/kebijakan/rencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan. Organisasi perlu menginterpretasikan kebijakan/program untuk dapat siap untuk dilaksanakan. Oleh karena itu diperlukan kesamaan pandang dalam bentuk adanya SOP, Juklak /juknis yg

dapat dijadikan guide/pedoman pelaksanaan. Dengan interpretasi, maka aktor pelaksana, mampu memahami isi sasaran, program, kebijakan

Uraian di atas mengarahkan bahwa dimensi interpretasi mengenai pengukurannya dapat dilihat dari indikator : pemahaman terhadap tujuan/ program, pemahaman terhadap tupoksi, sosialisasi informasi, sikap petugas, ketepatan media, dukungan masyarakat, dan tindak lanjut perbaikan.

Isi dan tujuan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap sudah dipahami dengan baik. Hal ini sesuai dengan wawancara dengan informan yang menyatakan para pelaksana sudah paham betul bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap merupakan bagian dari upaya membangun kesadaran masyarakat yang bertujuan melakukan perubahan *mindset* bahwa kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap erat kaitannya dengan aspek lingkungan, kesehatan, dan pariwisata. Disamping itu peran serta masyarakat dalam meningkatkan efektifitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap merupakan suatu tindakan yang integral dan tidak dapat terpisahkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan bahwa sudah menjadi tugas bagi pemerintah (Dinas PU dan Perhubungan melalui Seksi Kebersihan dan Pertamanan) untuk menjadi *leading sector* dalam pengelolaan sampah khususnya di wilayah Kecamatan Sesayap. Penyusunan progam kerja dan alokasi anggaran yang memadai merupakan tindak lanjut terhadap harapan terciptanya pengelolaan sampah yang baik dan benar. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung tetap berkomitmen untuk fokus pada permasalahan kebersihan lingkungan termasuk

dalam pelayanan pengelolaan sampah. Menurut Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Pehubungan, pihaknya berusaha untuk memaksimalkan berbagai hal guna meningkatkan mutu pengelolaan persampahan di Kabupaten Tana Tidung adalah salah satunya dengan pengalokasian porsi anggaran yang diharapkan cukup untuk mencapai tujuan dari program kerja yang telah disusun. Hasil wawancara dengan informan [7]) mengungkapkan bahwa :

> "Sebagai pimpinan, Kami senantiasa memberikan perhatian khusus dalam upaya mendorong terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan Tana Tidung pada umumnya, khususnya di wilayah Kecamatan Sesayap sebagai pusat pemerintahan yakni dengan mengalokasikan anggaran yang diharapkan dapat terserap maksimal untuk peningkatan sarana dan prasarana, pembayaran gaji petugas lapangan, maupun dalam hal penyusunan produk hukum daerah..."

Melalui sembilan program pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap, diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah, dengan melihat apakah program tersebut memberi manfaat bagi lingkungan masyarakat, apakah program tersebut dapat memacu partisipasi masyarakat, serta apakah program yang telah disepakati tersebut dapat direalisasikan sesuai dengan kemampuan dan daya dukung dari sumber daya yang tersedia.

Berdasarkan hasil dokumentasi, besaran nilai anggaran beserta serapan terhadap kesembilan program kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini :

---

[7] Hasil wawancara dengan Kepala Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016

Tabel 4.3
Nilai Pagu Anggaran untuk masing-masing Program Kerja
Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

No	Program Kerja	Pagu Anggaran (Rp)
1	Raperda Persampahan;	1,500,000,000.00
2	Dana Pendamping Pembangunan TPA;	300,000,000.00
3	Dana Pendamping 3R;	200,000,000.00
4	Dana Pendamping IPAL Kawasan;	300,000,000.00
5	UKL/UPL Tempat Pembuangan Akhir;	250,000,000.00
6	Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan;	3,000,000,000.00
7	Pemeliharaan Kendaraan Operasional;	330,000,000.00
8	Belanja Alat Peralatan Kebersihan;	2,094,000,000.00
9	Belanja Bahan Bakar Kebersihan.	400,000,000.00
JUMLAH		**8,374,000,000.00**

Sumber : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas PU Dan Perhubnngan Kabupaten Tahun Anggaran 2016

Dari kesembilan program tersebut, terdapat 2 (dua) program kerja unggulan yang menjadi prioritas utama bagi Dinas PU dan Perhubungan dalam peningkatan efektifitas pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap yakni Program Raperda Persampahan, dan Program Pembangunan TPA melalui dana APBN serta dana Pendamping APBD. Hasi wawancara dengan informan [8]} mengungkapkan :

> "Program kerja unggulan adalan pembangunan TPA. Pembangunan TPA merupakan tuntutan yang sangat mendesak karena di Kabupaten Tana Tidung belum ada Tempat Pembuangan Akhir yang memenuhi kriteria sesuai amanat undang-undang maupun Peraturan Presiden. Yang kedua adalah Raperda Persampahan yang diharapkan nantinya apabila sudah terbentuk, dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah sekaligus dapat dijadikan landasan hukum guna meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui retribusi sampah..."

[8] Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016

Guna mendukung terlaksananya program-program yang telah disusun sudah barang tentu harus didukung dengan kemampuan anggaran dana yang *digelontorkan* untuk masing-masing program kerja tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan [9]), bahwa kesesuaian anggaran dengan kebutuhan pengelolaan sampah untuk tahun 2016 sudah mencukupi.

> "Untuk tahun 2016 masalah anggaran kita tidak ada. Kesesuaian anggaran dengan kebutuhan di lapangan sudah mencukupi…"

Informasi di atas memberikan gambaran bahwa upaya peningkatan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap dilakukan salah satunya dengan memberikan porsi anggaran yang cukup. Hasil wawancara dengan informan [10]) mengungkapkan bahwa :

> "Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang berkaitan langsung dengan pengelolaan sampah, anggaran yang dialokasikan sudah mencukupi. Untuk peningkatan sarana dan prasarana, pembelian armada baru maupun perawatan armada lama, juga cukup untuk membayar gaji petugas di lapangan sesuai dengan standar minimum upah kabupaten untuk saat ini masih bisa dipenuhi..."

Meskipun telah didukung dengan anggaran yang memadai namun masih banyak kendala yang harus dihadapi oleh Seksi Kebersihan dan Pertamanan dalam mengatasi masalah pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. Hasil observasi menunjukkan bahwa salah satu kendala adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat di Kecamatan Sesayap dalam kaitannya dengan implementasi kebijakan pengelolaan sampah masih belum maksimal. Masyarakat cenderung menganggap pengelolaan sampah hanya merupakan tugas dari Dinas

---

[9] Hasil wawancara PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016
[10] Hasil wawancara PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016

PU dan Perhubungan semata. Pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa sampah adalah sisa-sisa materi yang tidak dapat digunakan lagi harus segera dibuang ke tempat-tempat sampah tampa harus memilah apakah sampah-sampah tersebut termasuk dalam jenis sampah organic atau sampah anorganik. Kondisi tersebut disebabkan masyarakat sebagai sumber penghasil sampah tidak pernah diberikan pemahaman oleh instansi terkait (Dinas PU dan Perhubungan) tentang tata cara pengelolaan sampah yang baik dan benar.

Kondisi tersebut disebabkan Dinas PU dan Perhubungan sendiri belum memiliki pedoman yang baku dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan [11]), dikemukakan bahwa untuk menyusun petunjuk teknis ataupun petunjuk pelaksanaan program diperlukan sebuah regulasi sebagai landasan hukumnya. Regulasi yang dimaksud masih dalam perencanaan.

> "Tahun ini diusahakan pembahasan Raperda Persampahan dan Retribusi Sampah dapat disampaikan ke DPRD. Saat ini dari pemda melalui Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan sedang melakukan kajian hukumnya. Diharapkan Raperda tersebut dapat disahkan pada tahun 2016 sehingga tahun 2017 sudah bisa dilaksanakan..."

Kelemahan implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap juga tidak terlepas dari belum adanya SOP yang jelas dalam pengelolaan sampah itu sendiri. Hal ini juga berkaitan dengan bentuk-bentuk sosialisasi yang dapat disampaikan oleh Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten

[11] Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016

Tana Tidung. Hasil wawancara dengan informan [12]) mengungkapkan :

> "Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas PU & Perhubungan berupa baliho-baliho dan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan…"

Kondisi berbeda ditemukan oleh peneliti. Yang mana baliho-baliho yang dimaksud tidak ditemukan selama rentang waktu penelitian. Demikian juga halnya dengan himbauan-himbauan yang dimaksud. Pada dasarnya tanpa himbauan sekalipun masyarakat pada umumnya telah membuang sampah pada tempat-tempat yang telah disediakan (kecuali daerah yang belum mendapatkan distribusi tempat-tempat sampah dari pemda).

Kendala lainnya adalah Tempat Pembuangan Akhir (TPA) di Kabupaten Tana Tidung yang belum memenuhi kriteria. Hasil wawancara dengan informan [13]) mengungkapkan bahwa kendala utama yang dihadapi saat ini adalah bagaimana kemampuan pemerintah untuk membangun TPA yang layak. Hasil wawancara mengungkapkan :

> "Masalah yang sangat mendesak adalah saat ini pemerintah belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir Sampah atau TPA yang layak. TPA yang sekarang masih pakai sistem *open dumping*. Rencana pembangunan TPA nantinya akan menggunakan metode *sanitary landfill*. Ketersediaan TPA sangat dibutuhkan karena TPA itu seumpama *WC*-nya rumah. Rumah tanpa *WC* kan repot…"

Pada aspek interpretasi, efektifitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap juga berkaitan erat dengan etos kerja dan komitmen serta kepatuhan implementor dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas dan tupoksinya. Petugas lapangan sebagai ujung tombak peningkatan

---

[12] Hasil wawancara dengan PPTK Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan, 9 Mei 2016

[13] Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016

efektifitas implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap dituntut untuk dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan [14]), komintmen dan etos kerja para petugas lapangan bervariasi. Sebagian rajin, yang sebagiannya lagi biasa-biasa saja.

> "Komitmen dan etos kerja petugas lapangan bervariasi. Ada yang rajin, ada yang biasa-biasa saja. Padahal mereka sudah dibeikan gaji yang sesuai dengan standar minimum kabupaten (Rp. 2.400.000,-). Apabila ada petugas yang tidak masuk kerja, selain diberikan teguran, juga dilakukakan pemotongan gaji. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja para petugas lapangan tersebut…"

Kondisi tersebut di atas tidak lepas dari kurangnya insentif yang diberikan pemerintah kepada para petugas lapangan. Meskipun besaran gaji yang diterima para petugas telah memenuhi standar minimum kabupaten, namun jumlah tersebut belum dapat dikatakan cukup untuk memenuhi kebutuhan bulanan para petugas. Sebagaimana hasil wawancara dengan informan [15]) yang menyatakan :

> "Gaji/upah bulanan yang kami terima lumayan untuk memenuhi kebutuhan untuk makan sehari-hari. Tapi pengeluaran lain seperti bayar sekolah anak, dan lain-lain mau tidak mau harus cari-cari lagi di lain..."

Disamping menyangkut insentif, faktor pendidikan menjadi salah satu aspek yang turut menentukan kinerja dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Hal ini terkait dengan pembagian tugas, bagaimana menterjemahkan maksud dan tujuan sebuah kebijakan, serta bagaimana mengaplikasikan sebuah kebijakan dengan menerapkan metode-metode yang efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan sasaran.

---

[14] Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016

[15] Hasil wawancara dengan petugas pengumpul sampah, 12 Mei 2016

Berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap, Bidang Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan Dinas PU Dan Perhubnngan Kabupaten Tana Tidung terdiri dari 5 orang pegawai negeri (PNS) serta Komposisi pegawai Bidang Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan Dinas PU Dan Perhubungan beserta petugas lapangan menurut tingkat pendidikan diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Pembagian pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	
		Orang	%
1	SD	3	3.13
2	SMP	9	9.38
3	SMA	79	82.29
4	SARJANA	5	5.21
Jumlah		**96**	**100.00**

Sumber : Dinas PU dan Perhubungan Kab. Tana TidungTahun 2016

Dari Tabel 4.4 tergambar bahwa tingkat pendidikan pegawai dan petugas lapangan Pada Bidang Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan Dinas PU Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung sangat bervariasi. namun yang dominan adalah yang berpendidikan SMA sebanyak 79 orang atau 82,29% dari total sebanyak 96 orang. Berpendidikan SMP sebanyak 9 orang (9,38%), berpendidikan Sekolah Dasar sebanyak 3 orang (3,13%), dan yang berpendidikan Sarjana hanya sebanyak 5 orang atau 5,21% dari total jumlah pegawai dan petugas lapangan.

Bagi yang berpendidikan tinggi, seringkali lebih mudah dalam memahami instruksi dan mandiri dalam melaksanakan tugas tanpa harus selalu diawasi. Sementara bagi yang berpendidikan relatif rendah seringkali membutuhkan

pengawasan untuk memastikan apa yang dilakukan dapat berjalan baik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Pengawasan diharapkan dapan menjamin terlaksananya pekerjaaan secara tepat dan mampu menunjukkan kinerja yang efektif.

Sikap masyarakat terhadap implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap menurut wawancara dengan informan adalah puas. Penulis mendapatkan informasi dari informan yang memberikan keterangan bahwa dulu, sebelum Dinas PU dan Perhubungan melaksanakan program pengelolaan sampah, masyarakat terpaksa membuang sampah di sungai maupun dengan cara membakar sampah. Kondisi tersebut mengakibatkan lingkungan terlihat kotor. Hasil wawancara dengan informan [16]) mengungkapkan :

> "Dulu sampah-sampah dikumpul di lahan kosong di belakang rumah. Sekitar 2 atau 3 hari kemudian dibakar. Sekarang sudah ada tong sampah yang ditaruh di depan hampir di setiap rumah jadi tinggal buang saja ke tong-tong sampah itu..."

Demikian juga dengan hasil wawancara dengan informan [17]) yang bermukim di areal pinggiran sungai mengungkapkan :

> "Dulu sampah langsung dibuang saja dari dapur. Terkadang sampah-sampahnya ada yang hanyut terbawa arus. Terkadang ada yang *nyangkut* di bawah kolong, tiang rumah, dan sebagainya. Kalau sudah surut (air surut), sampah-sampahnya jadi menumpuk dan tidak enak dipandang mata..."

Namun pernyataan berbeda dilontarkan salah seorang informan [18]), salah seorang masyarakat Kecamatan Sesayap mengatakan :

---

[16] Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tideng Pale, 12 Mei 2016
[17] Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Tideng Pale Timur, 12 Mei 2016
[18] Hasil wawancara dengan masyarakat Desa Gunwan, 12 Mei 2016

"Karena di sini tidak ada bak sampah, kendaraan dan petugas sampah masih jauh untuk dijangkau. Mau tidak mau, sampahnya kami kumpul untuk nanti dibakar..."

Pada umumnya kesadaran masyarakat dalam hal pengelolaan sampah di lingkungan masing-masing sudah dapat dikatakan memadai. Hasil observasi menunjukkan bahwa untuk daerah-daerah yang sudah tersedia sarana dan prasarana berupa tong-tong sampah, sebagian besar masyarakat sudah membuang sampahnya secara tertib, terkecuali dengan daerah-daerah yang belum disediakan tong-tong sampah dengan terpaksa harus mengumpulkan sampahnya untuk dibakar.

Berdasarkan pembahasan dari aspek Interpretasi, bahwa aspek interpretasi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung, peran Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam pengelolaan sampah masih lebih banyak pada penyedia dan pengelola layanan. Peran pemerintah seharusnya adalah melayani (melakukan negosiasi dan menjadi perantara beragam kepentingan di masyarakat dan membentuk nilai bersama).

Peran Pemerintah dalam memberikan pelayanan perlu menempatkan masyarakat sebagai *customer* dalam posisi yang seimbang dengan pemerintah sebagai *provider*. Posisi tersebut dapat ditinjau dari prinsip-prinsip akses informasi dan perbaikan. Ditinjau dari akses, belum semua lapisan masyarakat memiliki akses yang sama terhadap pelayanan pengelolaan sampah.

Sementara itu, masyarakat juga belum banyak mempunyai akses dalam pengambilan keputusan, masukan, saran serta monitoring bagaimana mekanisma pengelolaan dilakukan, bagaimana mekanisme penggunaan dana serta sejauh

mana potensi pengelolaan sampah kepada masyarakat. Dalam hal ini pihak pemerintah perlu mendefinisikan secara jelas mengenai kriteria mendasar melalui suatu keputusan bahwa akses dapat dimiliki oleh semua lapisan masyarakat, termasuk proses distribusi pelayanannya sehingga masyarakat dapat memahami atau menolak keputusan tersebut.

Sosialisasi dan informasi tersebut tidak hanya bermanfaat dalam kaitannya dengan sumber daya baik dana, tenaga, biaya, ide, dan saran, tetapi juga dalam hal monitoring dan evaluasi setiap kebijakan atau program. Sehingga diperlukan upaya menyebarluaskan informasi jasa pelayanan. Informasi tidak hanya disebarluaskan terhadap pengguna jasa pelayanan (*users*), tetapi juga harus disebarluaskan kepada petugas pelayanan pada tingkat yang paling bawah. Berbagai informasi tersebut sangat diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana cara pelayanan publik itu dilaksanakan, membuat keputusan terbaik tentang pelayanan apa yang ingin digunakan dan bagaimana cara memperoleh keuntungan maksimum dari pelayanan tersebut.

3. Aspek Aplikasi

Dalam implementasi kebijakan, aspek aplikasi merupakan konsep yang dikemukakan oleh Jones. Menurut Jones (1996 : 296) "*Application: the routine provision of services, payment, or other agreed upon program objectives or instruments*". Yang dimaksud aplikasi adalah; "Ketentuan rutin dari pelayanan, pembayaran atau lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan program. Oleh karena itu, aplikasi mengacu pada pelaksanaan pekerjaan yang

meliputi penyediaan barang dan jasa". Aplikasi suatu kebijakan publik merupakan salah satu faktor yang menentukan implementasi kebijakan publik. Pelaksanaan pekerjaan yang meliputi penyediaan atau penyesuaian terhadap tujuan program dan perangkatnya. Implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan dengan pengerahan segala sumber daya melalui aplikasi ini diharapkan akan muncul respon dari dari kelompok masyarakat apakah menerima atau menolak hasil kebijakan tersebut.

Sebagaimana telah dikemukakan pada awal pembahasan, bahwa melalui program yang telah disusun pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas PU dan Perhubungan dengan segala aktivitasnya melakukan berbagai upaya untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat berkaitan dengan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap. Oleh karena itu, dalam merealisasikan program tersebut harus konsisten dengan sumber daya yang tersedia, kemampuan pelaksana, mampu mengintegrasikan antara kebijakan pemerintah dengan segala inovasinya dan dengan nilai-nilai lokal yang bervariasi.

Berdasarkan hasil observasi, pola pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap saat ini dilaksanakan melalui 3 (tiga) tahap sebagai berikut :

1. Pengumpulan

Pada tahap pengumpulan, pengumpulan sampah dilakukan petugas terhadap tempat-tempat sampah yang telah disediakan dengan memasukkan isi tong-tong sampah tersebut ke *dump truck.* Untuk saat ini, kondisi tempat-tempat sampah tersebut sebagian masih memadai karena masih dalam kondisi baru hasil pengadaan pada tahun 2015. Namun ada juga yang sudah tidak memenuhi syarat

selain karena kondisinya yang sudah rusak, ukuran dari tong-tong sampah tersebut sudah tidak memadai untuk mengakomodir volume sampah yang dihasilkan. Dalam pengembangan layanan selanjutnya, perlu diadakan perubahan pada rancang bangun alat pengumpulan karena beberapa hal, sebagai berikut : Perubahan sifat fisik sampah seperti timbulan, komposisi, berat jenis, dan karakteristik mengingat kemungkinan adanya perbedaan yang mencolok pada kondisi fisik sampah dari setiap sumber; Dengan adanya pemilahan sampah di sumber antara sampah yang dapat didaur ulang, dikomposkan dan sampah B3, maka diperlukan adanya alat pengumpul yang sesuai untuk setiap jenis sampah hasil pilahan seperti alat dan pengumpul khusus untuk beras, untuk karet, untuk kaca, dan untuk logam.

Berdasarkan hasil observasi mengenai proses pengumpulan umumnya dengan mengerahkan armada yang dimiliki oleh Dinas PU dan Perhubungan berupa *dump truck* menuju TPS-TPS yang telah ditempatkan baik itu di kawasan pemukiman, perkantoran, dan lain sebagainya.

Sementara itu untuk pelayanan kebersihan pasar, pengumpulan sampah ke TPS menjadi tanggung jawab masing-masing penyewa areal/blok/kavling pasar. Sedangkan untuk pengangkutan dan pembuangan akhir menjadi tanggung jawab Dinas PU dan Perhubungan. Pola penanganan sampah di pasar yang meliputi kios-kios dan stand-stand, berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sebagian besar penanganannya telah terlayani.

Sementara untuk sampah-sampah yang berserakan di jalanan, sampah yang ada di jalan-jalan tersebut disapu oleh 4 s/d 5 orang tenaga penyapu setiap

100 m panjang jalan. Para penyapu jalan tersebut diperlengkapi dengan sapu lidi untuk menyapu, dan *serok sampah* untuk menampung hasil sapuan. Sampah yang terkumpul dibuang ke dalam wadah sampah yang ada di sepanjang tepi jalan atau dibuang di bak armada sampah apabila kebetulan armada sampah sedang lewat. Selanjutnya sampah yang ada di dalam bak tersebut diangkut oleh armada sampah bersamaan dengan pengambilan sampah yang ada di pertokoan dan pemukiman di sepanjang jalan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi, cakupan wilayah tugas penyapu jalan hanya mencakup Desa Tideng Pale, Desa Tideng Pale Timur, Desa Sedulun, Desa Limbu Sedulun, dan Desa Sebiday. Kelima desa tersebut merupakan wilayah terdekat dengan pusat ibu kota kabupaten dan pusat kecamatan sehingga dapat dikatakan kelima desa ini merupakan prioritas penanganan kebersihan dan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap.

2. Pengangkutan

Pengangkutan merupakan tahap sebelum sampah diangkut ke sarana pembuangan atau pengolahan akhir. Sarana pengangkutan yang ada masih kurang memadai. Selain faktor jumlah, *dump truck* dengan bak terbuka juga kurang memenuhi standar kesehatan maupun dapat menimbulkan bau yang kurang sedap saat melintas. Disamping itu, penggunaan *dump truck* dengan bak terbuka juga seringkali menimbulkan masalah berupa sampah-sampah yang sudah dimasukkan ke bak *dump truck* sebagian ada yang kembali tercecer ke jalanan. Bahkan untuk sampah-sampah seperti kertas dan plastik juga seringkali beterbangan dan hal tersebut dapat mengganggu pengguna jalan yang lain.

Pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan *dump-truck*. Dinas PU dan Perhubungan sampai tahun 2015 memiliki 3 buah *dump-truck* berdaya angkut 4 m^3.*Dump truk* berfungsi untuk melayani sampah daerah pemukiman, pasar, pertokoan, daerah pemukiman dan sepanjang jalan protokol di Kecamatan Sesayap dengan rotasi pelayanan yang diangkut sampai ke TPA sebanyak 2 kali sehari, mulai pukul 07:00 s/d 09:00 pagi dan pukul 19:00 s/d pukul 20:00 malam, dengan jadwal hari Senin sampai Sabtu. Dari sejumlah armada pengangkut sampah tersebut ternyata masih belum sebanding dengan volume sampah yang dihasilkan.

3. Pembuangan.

Tahap akhir dari proses pengelolaan sampah dilakukan dengan membuang sampah yang telah terkumpul ke suatu tempat terbuka yang telah disediakan. Pada dasarnya tempat pembuangan akhir ini adalah sebuah lahan kosong yang disewa oleh Pemda terletak agak jauh dari perkampungan warga.

Dengan pola seperti di atas, maka pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap belum memadai. Penimbunan sampah tanpa disertai dengan sistem pengolahan yang baik hanya akan menimbulkan masalah baru. Selain itu, proses penguraian sampah yang hanya mengandalkan proses alam dapat menimbulkan potensi bahaya seperti penyebaran penyakit, pencemaran lingkungan, hingga sampai pada masalah keindahan lingkungan.

Pada pembahasan mengenai aspek organisasi, terdapat 9 program kerja yang telah disusun dan sedang diselenggarakan oleh Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan dalam kaitannya dengan peningkatan implementasi

kebijakan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung Berdasarkan hasil observasi, mengenai program kegiatan Raperda Persampahan, biaya yang direncanakan sebesar Rp. 1.500.000.000,00, dengan langkah-langkah kegiatannya yaitu sebagai berikut : Proses koordinasi dan konsultasi daerah, sosialisasi Raperda Persampahan, dan biaya siding pengesahan Raperda. Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapai/*outcome* kegiatan yaitu terbentuknya produk hukum daerah dan meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui retribusi sampah.

Program kegiatan Dana Pendamping Pembangunan TPA. Biaya yang direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00, dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga; Belanja Jasa Konsultasi Penelitian. Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapai/*out come* kegiatannya adalah memperoleh hasil kajian yang konpeherensif mengenai pembangunan Tempat Pembuangan Akhir yang sesuai dengan kriteria yang diamatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Program/Kegiatan Dana Pendamping 3R. Biaya yang direncanakan sebesar Rp. 200.000.000,00 dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga; Belanja Jasa Konsultasi Penelitian Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapai/*out come* kegiatannya adalah memperoleh hasil kajian yang konpeherensif mengenai pemanfaatan sampah menjadi barang yang berguna melalui 3R dan komposter.

Program/Kegiatan Dana Pendamping IPAL Kawasan. Biaya yang

direncanakan sebesar Rp. 300.000.000,00 dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga; Belanja modal pengadaan instalasi air kotor. Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapai/*out come* kegiatannya adalah tersedianya fasilitas instalasi pengelolaan air kotor yang meliputi pembuatan jalan-jalan dan jaringan irigasi khususnya untuk wilayah Kecamatan Sesayap.

Program/Kegiatan UKL/UPL Tempat Pembuangan Akhir. Biaya yang direncanakan sebesar Rp. 250.000.000,00 dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga; Belanja jasa konsultasi penelitan. Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapai/*out come* kegiatannya adalah memperoleh hasil kajian yang konpeherensif mengenai pembentukan UKL/UPL Tempat Pembuangan Akhir yang sesuai dengan kriteria yang diamatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Persampahan.

Program/Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan. Biaya yang direncanakan sebesar Rp. 3.000.000.000,00 yang dialokasikan untuk pembayaran honorarium petugas kebersihan lingkungan. Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapai/*out come* kegiatannya adalah pemenuhan hak pegawai tidak tetap/non PNS sebagai insentif guna peningkatan kebersihan lingkungan hidup dan operasional kebersihan..

Program/Kegiatan Pemeliharaan Kendaraan Operasional. Biaya yang direncanakan sebesar Rp. 330.000.000,00 dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Proses pengadaan jasa pihak ketiga; Belanja perawatan

kendaraan bermotor, dan belanja penggantian suku cadang. Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapai/*out come* adalah terpeliharanya kondisi fisik kendaraan sehingga layak untuk beroperasi, serta meningkatnya kualitas pelayanan persampahan / kebersihan di Kecamatan Sesayap.

Program/Kegiatan Belanja Alat Peralatan Kebersihan. Biaya yang direncanakan sebesar Rp. 2.094.000.000,00 dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : Proses pengadaan oleh pihak ketiga; Belanja kendaraan bermotor, belanja peralatan mesin, belanja alat-alat peralatan kebersihan, belanja pakaian kerja lapangan. Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapai/*out come* adalah meningkatnya kualitas pelayanan persampahan / kebersihan di Kecamatan Sesayap.

Program/Kegiatan Belanja Bahan Bakar Kebersihan. Biaya yang direncanakan sebesar Rp. 400.000.000,00 dengan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut : belanja bahan bakar solar dan bahan bakar bensin. Berdasarkan proses langkah tersebut, maka hasil yang dicapai/*out come* adalah ketersediaan bahan bakar yang cukup guna mendukung operasional kendaraan serta peralataan mesin..

Dengan total anggaran sebesar Rp. 8.374.000.000,00 dapat dikatakan bahwa masalah pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung, khususnya Kecamatan Sesayap merupakan sebuah program prioritas dari oleh Dinas PU dan

Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan [19]) mengungkapkan :

> "Kecamatan Sesayap, khususnya Desa Tideng Pale sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung harus selalu terjaga kebersihannya. Maka daripada itu Kepala Dinas mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih delapan milyar sebagai komitmen bahwa masalah kebersihan dan pengelolaan sampah ini dipandang sebagai prioritas khusus. Bagaimanapun juga, Tideng Pale adalah teras terdepan dari Kabupaten Tana Tidung. Kebersihan dan keindahan Tideng Pale merupakan representasi dari kebersihan Kabupaten Tana Tidung secara keseluruhan..."

Perhatian khusus yang dimaksud tidak terlepas dari tanggung jawab besar yang diemban oleh Dinas PU dan Perhubungan dalam hal penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung yang belum dapat melibatkan swasta maupun pihak lainnya.

Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap mutlak menjadi tanggung jawab Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. Berdasarkan hasil dokumentasi, jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sebanyak 164 buah terdiri dari : 16 buah tong sampah biasa, 100 buah tong sampah drum, 20 buah tong sampah fiber, dan 28 buah tong sampah tiang. TPS-TPS tersebut disebar ke 6 desa yang ada di Kecamatan Sesayap yaitu Desa Tideng Pale, Desa Tideng Pale Timur, Desa Sebidai, Desa Sedulun, Desa Limbu Sedulun, dan Desa Sebawang.

Hasil observasi menunjukkan bahwa ketersediaan TPS-TPS tersebut sejauh ini sudah mendukung terhadap pembuangan sampah. Timbunan sampah sangat jarang ditemui. Hanya pada waktu-waktu tertentu saja terlihat tumpukan

---

[19] Hasil wawancara dengan Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016

sampah seperti pada hari libur maupun pasca penyelenggaraan event-event tertentu.

Berbeda halnya dengan kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada. Berdasarkan hasil observasi, kondisi TPA yang ada sudah tidak memadai. Untuk proses pemusnahannya, kumpulan sampah yang dibuang ke TPA kemudian dibakar. TPA yang ada tidak memenuhi standar kriteria yang diamatkan oleh undang-undang yang mana Tempat Pembuangan Akhir (TPA) merupakan tempat dimana sampah mencapai tahap terakhir dalam pengelolaan sejak mulai timbul di sumber, pengumpulan, pemindahan/pengangkutan, pengolahan dan pembuangan. TPA merupakan tempat dimana sampah diisolasi secara aman agar tidak menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitarnya. Karenanya diperlukan penyediaan fasilitas dan perlakuan yang benar agar keamanan tersebut dapat dicapai dengan baik.

Selama ini masih banyak persepsi keliru tentang TPA yang sering dianggap hanya sebagai tempat pembuangan sampah. Hal ini menyebabkan banyak pemerintah daerah merasa sayang untuk mengalokasikan pendanaan bagi penyediaan fasilitas di TPA yang dirasakan kurang prioritas dibandingkan dengan penggunaan sektor lainnya. Di TPA, sampah masih mengalami proses penguraian secara alamiah dengan jangka waktu panjang. Beberapa jenis sampah dapat terurai secara cepat, sedang yang lainnya lebih lambat; bahkan beberapa jenis sampah tidak berubah sampai puluhan tahun; misalnya pastik. Hal ini memberikan gambaran bahwa setelah TPA selesai digunakanpun masih ada

proses yang berlangsung dan menghasilkan beberapa zat yang dapat mengganggu lingkungan.

Meskipun demikian, Dinas PU dan Perhubungan telah menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan melakukan kajian akademis pembangunan TPA yang memadai. Hasil kajian tersebut dijadikan panduan bagi Dinas PU dan Perhubungan dalam membangun TPA yang sesuai persyaratan. Hasil wawancara dengan informan [20]) mengungkapkan :

> "Hasil kajian penelitian ahli sudah ada. Saat ini proses pembangunan TPA masih dalam tahap koordinasi dengan pemerintah pusat karena ada *sharing* dana APBN dan APBD. Insya Allah tahun ini kita kejar pembangunan fisiknya..."

Apabila pembangunan tempat pengelolaan sampah tersebut selesai, maka penanganan sampah akan dilakukan dengan intensif, yaitu akan dibuat *sanitary landfill* (pemisahan sampah sesuai dengan unsur pembuat sampah), seperti sampah kering, basah, plastik, organik, non organik dll. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung akan mengacu kepada Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 yang telah diberlakukan sejak tahun 2013, dimana dalam salah satu pasalnya disebutkan, bahwa pihak pemerintah dapat dikenai sanksi setahun penjara atau denda Rp.5 miliar, apabila penanganan sampah dapat membuat kerusakan atau penyakit pada masyarakat.

Dinas PU dan Perhubungan melalui Seksi Kebersihan dan Pertamanan juga terus berupaya untuk menjalin hubungan dengan pihak-pihak terkait guna mendukung terciptanya efektifitas pengelolaan sampah yang baik salah satunya

---

[20] Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016

dengan Bappeda Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Tana Tidung. Salah satu bentuk upaya koordinasi tersebut adalah penyelenggaraan sosialisasi mengenai kebersihan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Tana Tidung. Hasil wawancara dengan informan [21]) mengungkapkan :

> "Kedepannya kita akan melibatkan Bidang Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Tana Tidung dalam upaya memberikan sosialisasi kepada mayarakat mengenai pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah ini..."

Ketersediaan armada yang dikerahkan untuk pengangkutan sampah dengan volume sampah yang harus ditangani juga menjadi perhatian tersendiri bagi Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung. Untuk saat ini, ketersediaan armada pengangkut dengan area pelayanan Kecamatan Sesayap belum memadai. Pengangkutan sampah dilakukan dengan menggunakan *dump-truck*. Dinas PU dan Perhubungan sampai dengan saat ini memiliki 3 buah *dump-truck* berdaya angkut 4 m^3. Ketiga buah *dump truck* tersebut adalah hasil pengadaan belanja modal tahun anggaran 2013. Kendala yang sering dihadapi adalah dikarenakan kondisi armada yang dimiliki merupakan kendaraan lama, maka dibutuhkan perawatan secara berkala. Hasil wawancara [22]) dengan informan mengungkapkan :

> "Karena *dump truck* yang kita miliki ini adalah kendaraan lama maka butuh perhatian lebih. Ketika salah satunya saja *rewel*, dapat mengakibatkan keterlambatan pengangkutan karena harus di-*back up* oleh *dump truck* yang dapat beroperasi. Padahal masing-masing kendaraan tersebut sudah diatur wilayah kerjanya..."

---

[21] Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016

[22] Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016

Berkaitan dengan hal itu, Dinas PU dan Perhubungan menganggarkan pengadaan 1 unit *pick up* dan 3 unit sepeda motor gerobak modifikasi sampah pada APBD 2016. Hal tersebut sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kebersihan kepada masyarakat. Dalam kaitan ini, hasil wawancara dengan informan [23]) mengungkapkan :

> "Tahun ini akan ada pengadaan 1 unit mobil jenis *pick up* dan 3 unit motor gerobak modifikasi..."

Dengan penambahan 1 unit mobil jenis *pick up* dan 3 unit sepeda motor gerobak modifikasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektifitas implementasi pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap yang meliputi 7 desa sebagaimana hasil wawancara dengan informan [24]) yang mengungkapkan :

> "Melalui pengadaan 1 unit mobil jenis *pick up* dan 3 unit motor gerobak modifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap serta dapat mempercepat proses pengumpulan sampah-sampah dari TPS-TPS yang tersedia..."

Pengaturan pengangkutan sampah menggunakan metode rolling. Para petugas pengangkut sampah dibagi menjadi beberapa kelompok. Berdasarkan hasil observasi, kelompok-kelompok tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kelompok. Area kerja tiap-tiap kelompok tersebut ditentukan oleh PPTK. Masing-masing kelompok berjumlah antara 4 sampai dengan 5 orang yang terdiri dari petugas pengangkut sampah dan supir *dump truck* dengan area kerja yang di-*rolling* setiap minggunya. Begitu juga dengan anggota kelompoknya. Setiap minggu PPTK akan melakukan sistem *rolling* dengan tujuan agar para anggota kelompok pengangkut

---

[23] Hasil wawncara denga Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung, 9 Mei 2016

[24] Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016

sampah tidak mengalami rasa bosan. Hasil wawancara dengan informan [25]) mengungkapkan :

> "Pengaturan pengangkutan di-*rolling* setiap minggu. 4 grup tukang angkut, tukang sapu 4 grup. pemilah sampah setiap hari. tukang sapu tiap hari dengan tujuan supaya ada penyegaran..."

Guna mengawasi pekerjaan para petugas pengangkut sampah, maka Dinas PU dan Perhubungan mempekerjakan 5 (lima) orang petugas pengawas lapangan. Pengawas-pengawas lapangan tersebut bertanggung jawab kepada PPTK dengan tugas menyampaikan laporan berupa daftar absensi petugas lapangan dan kebutuhan peralatan operasional.

Disamping itu, hasil observasi juga mendapati bahwa hampir setiap minggu (seringkali pada hari Jum'at), Kepala Seksi Kebersihan dan Pertamanan atau PPTK secara bersama-sama maupun bergantian turun ke lapangan untuk memonitor secara langsung pekerjaan para petugas lapangan. Tidak jarang juga mereka ikut terlibat langsung bersama-sama petugas membersihkan parit. Tindakan tersebut menimbulkan pertanyaan tersendiri bagi penulis mengenai apa motivasi dan tujuan pegawai Seksi Kebersihan dan Pertamanan tersebut.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Selama ini sebagian besar masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir, yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat

---

[25] Hasil wawancara dengan PPTK Program Kegiatan Peningkatan Kebersihan Lingkungan Hidup Dan Operasional Kegiatan, 9 Mei 2016

pemrosesan akhir sampah. Paradigma ini sudah seharusnya ditinggalkan dan diubah menjadi paradigma yang memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan. Sampah yang dikelola berdasarkan Undang-Undang ini terdiri atas sampah rumah tangga, sampah sejenis sampah rumah tangga, dan sampah spesifik. Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin dari Kepala Daerah sesuai dengan kewenangannya. Bupati/Walikota dapat menerapkan sanksi administratif kepada pengelola sampah yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan.

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membiayai penyelenggaraan pengelolaan sampah. Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Hal ini dapat dilakukan melalui : pemberian usul, pertimbangan, dan saran kepada Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; perumusan kebijakan pengelolaan sampah; dan pemberian saran dan pendapat dalam penyelesaian sengketa persampahan.

Dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah disebutkan bahwa masyarakat juga berpartisipasi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga, baik dalam hal pengurangan sampah (meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang) serta penanganan sampah (meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir)

Target pelayanan adalah masyarakat sebagai warga negara (*Citizens*). Karena kepentingan publik merupakan hasil dialog tentang nilai-nilai bersama,

maka tentunya pemerintah tidak semata-mata merespon tuntutan yang datang dari masyarakat, tetapi justru memusatkan perhatian untuk membangun kepercayaan dan kolaborasi dengan dan diantara masyarakat.

Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola sampah, diantaranya dapat dilihat dari : Masih rendahnya upaya pemilahan sampah, masih rendahnya pengawasan masyarakat dalam upaya pengelolaan sampah, masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sampah untuk kepentingan ekonomi, pemakaian/penggunaan plastik yang tidak terkendali (serba plastik).

Berdasarkan pembahasan dari aspek aplikasi, bahwa aspek aplikasi dalam pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung pada umumnya apabila ditinjau dari *output* layanan, pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap masih menunjukkan kinerja yang belum optimal. Meskipun banyak sudut daerah yang bersih namun masih banyak tumpukan sampah di bebarapa sudut daerah yang lain. Kondisi ini berbeda dengan beberapa bagian tempat/sudut kota terutama pada pusat kota dan yang dekat dengan area perkantoran justru terlihat bersih.

Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di Kecamatan Sesayap merupakan sampah basah, yaitu mencapai 60-70% dari total volume sampah. Oleh karena itu, pengelolaan sampah yang terdesentralisisasi sangat membantu dalam meminimalisasi sampah yang harus dibuang ke tempat pembuangan akhir. Pada prinsipnya pengelolaan sampah haruslah dilakukan sedekat mungkin dengan sumbernya.

Partisipasi masyarakat dapat ditingkatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan dengan pertimbangan, bahwa masyarakat sebagai sumber produksi sampah. Partisipasi masyarakat selain dalam aspek kesadaran dan pengumpulan sampah pada tingkat TPS juga dapat ditingkatkan berkaitan dengan perlunya pemisahan sampah sejak dari sumbernya. Sampah organik sudah terpisahkan dengan sampah non-organik sejak dari rumah tangga hunian, kawasan niaga, dan jalan raya. Disamping itu, pemerintah sebagai penyelenggara kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap juga dituntun untuk dapat menyediakan sarana dan prasarana yang memadai agar tidak terjadi ketimpangan antara satu desa dengan desa yang lainnya.

Selama ini pengelolaan sampah hanya sekedar mengangkut dan membuang hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Sementara itu kondisi TPA tidak memadai. Kondisi TPA yang buruk dapat menimbulkan persoalan lingkungan dan mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar TPA. Persoalan lingkungan yang sering terjadi seperti pencemaran air (baik air permukaan maupun air tanah), pencemaran tanah, dan pencemaran udara. Pencemaran sampah ini akan menimbulkan beberapa penyakit seperti inpeksi saluran pernapasan atas (ISPA), TB paru kronis dan penyakit kulit.

Berkaitan dengan hal tersebut, yang menyebabkan sampah di TPA selama ini menumpuk adalah tercampurnya sampah organik dan non-organik. Untuk pemisahannya akan diperlukan biaya yang tinggi serta waktu yang lama. Hal inilah yang menyebabkan beberapa permasalahan, seperti pencemaran lingkungan di sekitar TPA, kebutuhan TPA yang baru, tidak adanya partisipasi masyarakat

dalam pengkomposan. Masalah kebutuhan TPA yang baru akan sulit diatasi mengingat dimasa mendatang akan sangat sukar memperoleh lahan TPA yang baru.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan disimpulkan bahwa Implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung yang didasarkan pada 3 aspek yakni ; organisasi, interpretasi, dan aplikasi. Dari hasil penelitian pada umumnya sudah berfungsi dan direalisasikan, kendati hasilnya belum sepenuhnya efektif. Dari ketiga aspek Implementasi Kebijakan pengelolaan sampah tersebut menunjukkan hasil sebagai berikut :

Pada aspek organisasi, Dinas PU dan Perhubungan melalui Seksi Kebersihan dan Pertamanan pada Bidang Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan selaku pelaksana kebijakan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dalam pengelolaan sampah, kendati belum didasarkan pada *Standard Operating Procedure* (SOP) kegiatan yang bersifat baku. Koordinasi antara pelaksana implementasi (Dinas PU dan Perhubungan) dengan pihak lain masih terbatas pada pertemuan/rapat-rapat yang sifatnya insidental yang berimplikasi pada ketidakpaduan pengelolaan sampah kebersihan pasar antara Dinas PU dan Perhubungan dengan Disperindagkop.

Pada aspek interpretasi, dukungan masyarakat belum maksimal. Masyarakat masih menganggap pengelolaan sampah hanya merupakan tugas dari Dinas PU dan Perhubungan semata. Kurangnya dukungan masyarakat disebabkan kurangnya sosialisasi oleh Dinas PU dan Perhubungan akan pentingnya

partisipisasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Di lain pihak, insentif/gaji yang diberikan kepada para petugas lapangan belum mencukupi untuk pemenuhan kebutuhan hidup bulanan. Kondisi tersebut mengakibatkan sikap para petugas lapangan dalam melaksanakan tugas menjadi bervariasi. Ada petugas yang rajin, yang kurang rajin juga ada.

Pada aspek aplikasi, *output* dari pelaksanaan program kegiatan belum sepenuhnya dapat dirasakan oleh mesyarakat Kecamatan Sesayap. Di Desa Gunawan, pemerintah belum menyediakan sarana dan prasarana sebagai fasilitas pengelolaan sampah. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung juga belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang memenuhi standar kriteria yang ditetapkan oleh undang-undang.

B. SARAN

Dari kesimpulan yang sudah diuraikan di atas dapat dilihat bahwa masih ada kekurangan dari setiap aspekt implementasi dalam pelaksanaan Implementasi Pengelolaan Sampah di Kecamatan Sesayap Kabupaten Tana Tidung. Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut :

Pada aspek organisasi, Pemerintah Kabupaten Tana Tidung melalui Dinas PU dan Perhubungan perlu segera merancang dan menetapkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang berisi petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan sampah. Koordinasi dengan Disperindagkop juga harus ditingkatkan guna meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah di sekitar areal pasar Imbayud.

Pada aspek interpretasi, Dinas PU dan Perhubungan perlu mensosialisasikan program pengelolaan sampah yang baik dan benar kepada masyarakat. Pemberian insentif/gaji kepada petugas lapangan juga perlu menjadi perhatian khusus. Penerapan *punish and reward* tidak ada salahnya untuk diberlakukan. Bagi petugas yang kinerjanya baik, dapat diberikan kelebihan upah, sedangkan bagi petugas yang kinerjanya kurang baik, dapat dikenakan pemotongan upah.

Pada aspek aplikasi, Dinas PU dan Perhubungan perlu segera membangun Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang sesuai dengan standar kriteria menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah yaitu dengan pembanganunan TPA menggunakan sistem *sanitary landfill.*

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abidin, Said Zainal. 2004. *Kebijakan Publik.* Jakarta: Pancur Siwah

Anderson, James E. 1978. *Public Policy-Making,* Second Edition, Chicago: Holt, Rinehart and Winston

Arikunto, Suharsimi. 2006. *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Balai Pustaka

Baedhowi. 2004. Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah Bidang Pendidikan : Studi Kasus di Kabupaten Kendal dan Kota Surakarta. Jakarta: *Disertasi* Departemen Ilmu Administrasi FISIP Universitas Indonesia

Davis. Keith. 1972. *Human Behavior at Work: Human Relation and Organizational Behavior.* USA: McGraw-Hill Inc

Dye, Thomas R. 1992. *Understanding Public Policy,* New Jersey: Englewood Cliffs

Edward III, George C. 1980. *Implementation Public Policy.* Washington DC Congresional

Ekowati. 2005. *Perencanaan, Implementasi dan Evaluasi atau Program.* Surakarta: Pustaka Cakra

Fiyal. 2013. Implementasi Kebijakan Rencana Tata Kelola Ruang Wilayah Kota Surabaya. Surabaya: *Tesis*. Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hang Tuah Surabaya

Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in The Third World.* New Jersey: Princeton University Press

Goggin. Malcolm L *et al.* 1990. *Implementation. Theory and Practice : Toward a Third Generation.* USA: Scott. Foresmann and Company

Hasan, Z M. 1990. Karakteristik Penelitian Kualitatif. Malang : YAB

Hendriyani. I. 2008. Manajemen Pengetahuan dalam Analisis Akuntabilitas Setjen Departemen Pekerjaan Umum. Bandung: *Tesis*. Program Studi Pembangunan. Institut Teknologi Bandung.

Jones, Charles O. 1984. *An Introduction to the Study of Public Policy*. Monterey, California: Brooks/Cole Publishing Company.

Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Keban, Yeremias. 2007. Pembangunan Birokrasi di Indonesia: Agenda Kenegaraan yang Terabaikan. Yogyakarta: Pidato Pengukuran Guru Besar. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada.

Kodoatie, Robert. 2003. Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Mazidah. 2013. Implementasi Kebijakan Pemerintah dalam Penataan Jurusan Filsafat Politik Islam. Surabaya: Skripsi. Fakultas Ushuluddin IAIN Sunan Ampel.

Miles, B.B. dan Huberman, A.M. 1992. Analisa data Kualitatif. Jakarta: UI Press

Moleong, Lexy J. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset

Nakamura, Robert T and Smallwood, F. 1980. *The Politics of Policy Implementation.* New York: Dartmouth College, St. Martin's Press

Nugraha. 2014. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah. Bandung: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Komputer Indonesia

Nugroho, Riant. 2004. Kebijakan Publik. Formulasi. Implementasi. dan Evaluasi. Jakarta: PT Elex Media Komputindo

Permata Sari, M.A. dan Rustan, A. 2009. Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Sampah. Samarinda: PKP2A LAN III

Pressman, J.L. and Wildavsky, A. 1973. *Implementation.* Barkley and Los Angeles: University of California Press

Quade, E.S. 1984. *Analysis For Public Decision.* New York: Elsevier Science Publicher

Ripley, Randall B. 1985. *Policy Analysis in Political Science.* Chicago: Nelson-Hall Publisher

Ripley, Randall B and Franklin, G. 1986. *Policy Implementation Bereaucracy.* Chicago: Dorsey Press.

Robbins, Stephen P. 1994. *Teori Organisasi : Struktur, Desain, dan Aplikasi,* Edisi Ketiga, Alih Bahasa Jusuf Udaya, Arcan, Jakarta.

Salim. Emil. 1993. Pembangunan Berwawasan Lingkungan. Jakarta: LP3ES.

Sari, Maria A.P. dan Rustan, A. 2009. Implementasi Good Governance Dalam Pengelolaan Sampah. Samarinda: PKP2A LAN III

Sejati. K. 2009. Pengolahan Sampah Terpadu. Yogyakarta: Kanisius

Sabatier, Paul. 1986. Top-down and Bottom-up Approach to Implementation Reasearch. A Critical Analysis and Suggested Synthesis. *Journal of Public Policy*, 6 : 21-48

Singarimbun, M & Effendi, S. 1995. Metode Penelitian Survey. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia

Sugiyono, 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung; Alfabeta

Sutarto. 2004. Implementasi Kebijakan Persampahan di Kota Semarang. Semarang: Tesis. Program Studi Magister Ilmu Administrasi Konsentrasi Magister Administrasi Publik Universitas Diponegoro Semarang

Sutejo. Bima. 2015. Implementasi Undang-undang No. 8 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Oleh Badan Lingkungan Hidup Di Kota Sragen. Surakarta: Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung: AIPI Puslit KP2W Lemlit Unpad

Tangkilisan. 2003. Implementasi Kebijakan Publik Transformasi Pikiran George Edwards. Yogyakarta: Penerbit Lukman

Tarigan, Antonius. 2000. Implementasi Kebijakan Jaring Pengaman Sosial: Studi Kasus Program Pengembangan Kecamatan di Kabupaten Dati II Lebak, Jawa Barat. Yogyakarta: Tesis. Masigter Administrasi Publik UGM

Wahab, Solichin Abdul. 2002. Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Wibawa, Samudra. 1994. Kebijakan Publik. Jakarta: Intermedia.

Winarno, Budi. 2002. Teori dan Proses Kebijakan Publik. Yogyakarta: Media Pressindo.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 15 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok. Fungsi Dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung

Website

Dasar Pengelolaan Sampah Kota: 2008. (http:// www.docstoc.com/docs/34499795/Dasar- Pengelolaan-Sampah-Kota diakses 23 September 2015).

Lampiran 1. Pedoman dan Hasil Wawancara

WAWANCARA KEPADA KEPALA DINAS PU DAN PERHUBUNGAN KABUPATEN TANA TIDUNG (9 MEI 2016)

1. Dalam Segi alokasi anggaran, apakah menjadi prioritas?

   "Sebagai pimpinan, Kami senantiasa memberikan perhatian khusus dalam upaya mendorong terciptanya kebersihan dan keindahan lingkungan Tana Tidung pada umumnya, khususnya di wilayah Kecamatan Sesayap sebagai pusat pemerintahan yakni dengan mengalokasikan anggaran yang diharapkan dapat terserap maksimal untuk peningkatan sarana dan prasarana, pembayaran gaji petugas lapangan, maupun dalam hal penyusunan produk hukum daerah"

WAWANCARA KEPADA KEPALA SEKSI KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
(Tanggal 9 Mei 2016)

1. Bagaimana koordinasi dan alur kerja penanganan sampah dari mulai Pemda, Kecamatan Sesayap sampai pada tingkat Desa, RW RT & pusat-pusat kegiatan masyarakat (Pasar dan Perumahan)?
   Sampah-sampah yang berasal dari pasar, sebisanya kami angkut. Namun kami khawatir adanya tumpang tindih pekerjaan dengan Dinas Perindagkop mengenai urusan pasar ini

2. Apakah Dinas PU & Perhubungan memiliki SOP yg lengkap dalam pengelolalan persampahan?
   Sampai dengan saat ini kita belum memiliki SOP yang mengatur mengenai pembagian tugas kepada para petugas lapangan. Petugas lapangan ditugaskan secara lisan saja dengan pengaturan jadwal yang sewaktu-waktu dapat disesuaikan

3. Berapa anggaran yang dikucurkan APBD tahun 2016 untuk pengelolaan sampah di Kab. Tana Tidung?
   Kecamatan Sesayap, khususnya Desa Tideng Pale sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Tana Tidung harus selalu terjaga kebersihannya. Maka daripada itu Kepala Dinas mengalokasikan anggaran sebesar kurang lebih delapan milyar sebagai komitmen bahwa masalah kebersihan dan pengelolaan sampah ini dipandang sebagai prioritas khusus. Bagaimanapun juga, Tideng Pale adalah teras terdepan dari Kabupaten Tana Tidung. Kebersihan dan keindahan Tideng Pale merupakan representasi dari kebersihan Kabupaten Tana Tidung secara keseluruhan

4. Apakah kebijakan pengelolaan sampah di Kec. Sesayap termasuk leading sector (menjadi prioritas), apa buktinya?
   Semua program disusun guna peningkatan efektifitas pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung pada umumnya. Namun yang jadi prioritas utama dan program kerja unggulan untuk tahun 2016 adalah Raperda Persampahan dan pembangunan Tempat Pembuangan akhir
   Program kerja unggulan adalan pembangunan TPA. Pembangunan TPA merupakan tuntutan yang sangat mendesak karena di Kabupaten Tana Tidung belum ada Tempat Pembuangan Akhir yang memenuhi kriteria sesuai amanat undang-undang maupun Peraturan Presiden. Yang kedua adalah Raperda Persampahan yang diharapkan nantinya apabila sudah terbentuk, dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah sekaligus dapat dijadikan landasan hukum guna meningkatkan potensi pendapatan daerah melalui retribusi sampah.

5. Program apa saja yg disusun tahun 2016 untuk pengelolaan sampah ini?
Semua program disusun guna peningkatan efektifitas pelayanan pengelolaan sampah di Kabupaten Tana Tidung pada umumnya. Namun yang jadi prioritas utama dan program kerja unggulan untuk tahun 2016 adalah Raperda Persampahan dan pembangunan Tempat Pembuangan akhir.
Tahun ini diusahakan pembahasan Raperda Persampahan dan Retribusi Sampah dapat disampaikan ke DPRD. Saat ini dari pemda melalui Bidang Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Dinas PU dan Perhubungan sedang melakukan kajian hukumnya. Diharapkan Raperda tersebut dapat disahkan pada tahun 2016 sehingga tahun 2017 sudah bisa dilaksanakan

WAWANCARA KEPADA PPTK PROGRAM KEGIATAN PENINGKATAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN HIDUP DAN OPERASIONAL KEGIATAN
(9 MEI 2016)

1. Apakah penyebaran tugas untuk Bidang Tata Ruang, Kebersihan Dan Pertamanan sudah dapat dikatakan proporsional (sesuai jumlah petugas dan volume pekerjaan)?
   Pembagian personil untuk Seksi Kebersihan Dan Pertamanan belum dapat dikatakan proporsional bila dibandingkan antara jumlah pegawai dengan volume pekerjaan.
   .

2. Dari segi kuantitas, apakah jumlah karyawan / petugas lapangan sudah memadai ?
   Untuk wilayah Kecamatan Sesayap jumlah personil yang dikerahkan sudah memadai

3. Bagaimana komitmen dan etos kerja pegawai dalam pelaksanaan tugas di lapangan?
   Komitmen dan etos kerja petugas lapangan bervariasi. Ada yang rajin, ada yang biasa-biasa saja. Padahal mereka sudah dibeikan gaji yang sesuai dengan standar minimum kabupaten (Rp. 2.400.000,-). Apabila ada petugas yang tidak masuk kerja, selain diberikan teguran, juga dilakukakan pemotongan gaji. Selanjutnya akan dilakukan evaluasi terhadap kinerja para petugas lapangan tersebut

4. Dalam bentuk apa sosialisasi mengenai pengelolaan sampah di tempat - tempat umum?
   Sosialisasi yang dilaksanakan oleh Dinas PU & Perhubungan berupa baliho-baliho dan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar membuang sampah pada tempat yang telah disediakan.
   Kedepannya kita akan melibatkan Bidang Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Tana Tidung dalam upaya memberikan sosialisasi kepada mayarakat mengenai pentingnya kebersihan dan pengelolaan sampah ini

5. Kendala utama apa yang membuat masalah persampahan kurang tertangani dengan baik?
   Masalah yang sangat mendesak adalah saat ini pemerintah belum memiliki Tempat Pembuangan Akhir Sampah atau TPA yang layak. TPA yang sekarang masih pakai sistem *open dumping*. Rencana pembangunan TPA nantinya akan menggunakan metode *sanitary landfill*. Ketersediaan TPA sangat dibutuhkan karena TPA itu

seumpama *WC*-nya rumah. Rumah tanpa *WC* kan repot

6. Langkah strategis apa yang dilakukan Pemkab (Dinas PU & Perhubungan) dalam melakukan terobosan mengatasi masalah persampahan di Kec. Sesayap?
   Hasil kajian penelitian ahli sudah ada. Saat ini proses pembangunan TPA masih dalam tahap koordinasi dengan pemerintah pusat karena ada *sharing* dana APBN dan APBD. Insya Allah tahun ini kita kejar pembangunan fisiknya

7. Berapa armada yg dikerahkan untuk pengangkutan sampah, dan apakah dengan kondisi ini sudah memadai?
   Karena *dump truck* yang kita miliki ini adalah kendaraan lama maka butuh perhatian lebih. Ketika salah satunya saja *rewel*, dapat mengakibatkan keterlambatan pengangkutan karena harus di-*back up* oleh *dump truck* yang dapat beroperasi. Padahal masing-masing kendaraan tersebut sudah diatur wilayah kerjanya.
   Melalui pengadaan 1 unit mobil jenis *pick up* dan 3 unit motor gerobak modifikasi ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap serta dapat mempercepat proses pengumpulan sampah-sampah dari TPS-TPS yang tersedia

8. Bagaimana pengaturan pengangkutan dan frekuensinya setiap minggu?
   Pengaturan pengangkutan di-*rolling* setiap minggu. 4 grup tukang angkut, tukang sapu 4 grup. pemilah sampah setiap hari. tukang sapu tiap hari dengan tujuan supaya ada penyegaran

WAWANCARA KEPADA PETUGAS KEBERSIHAN
(12 MEI 2016)

1. Dari segi kuantitas, apakah jumlah karyawan / petugas lapangan sudah memadai ?
   Jumlah petugas sudah cukup memadai karena cakupan wilayah operasi Kecamatan Sesayap tidak terlalu luas dan pekerjaannya juga tidak terlalu rumit.

2. Apakah insentif petugas lapangan yang diterima setiap bulan bisa mencukup kebutuhan hidup layak?
   Gaji/upah bulanan yang kami terima lumayan untuk memenuhi kebutuhan untuk makan sehari-hari. Tapi pengeluaran lain seperti bayar sekolah anak, dan lain-lain mau tidak mau harus cari-cari lagi di lain.

WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT DESA TIDENG PALE

Nama (Inisial) : OS

Alamat : Jl. Jend. Sudirman RT. 1 Desa Tideng Pale

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal wawancara : 12 Mei 2016

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pengelolaan sampah oleh Pemda Tana Tidung saat ini?
   Dulu sampah-sampah dikumpul di lahan kosong di belakang rumah. Sekitar 2 atau 3 hari kemudian dibakar. Sekarang sudah ada tong sampah yang ditaruh di depan hampir di setiap rumah jadi tinggal buang saja ke tong-tong sampah itu

2. Sudah puaskah bapak dengan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemda Tana Tidung saat ini?
   Lumayan puas.

3. Apa saran dan masukan yang ingin bapak sampaikan terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap?
   Kalau bisa dibuat peraturan tentang waktu buang sampah seperti di Kota Tarakan. Jam buang sampah di sana sekitar jam 8 malam (20:00 wita) s/d jam 6 pagi (06:00 wita), supaya tertib.

WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT DESA TIDENG PALE

Nama (Inisial) : YR

Alamat : Jl. Manunggal RT. 1V Desa Tideng Pale Timur

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal wawancara : 12 Mei 2016

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pengelolaan sampah oleh Pemda Tana Tidung saat ini?
   Dulu sampah langsung dibuang saja dari dapur. Terkadang sampah-sampahnya ada yang hanyut terbawa arus. Terkadang ada yang *nyangkut* di bawah kolong, tiang rumah, dan sebagainya. Kalau sudah surut (air surut), sampah-sampahnya jadi menumpuk dan tidak enak dipandang mata.

2. Sudah puaskah bapak dengan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemda Tana Tidung saat ini?
   Cukup memuaskan.

3. Apa saran dan masukan yang ingin bapak sampaikan terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap?
   Di tempat kami bak sampahnya masih kurang. Yang ada juga sudah banyak yang rusak. Tolong ditambahkan bak sampahnya.

WAWANCARA KEPADA MASYARAKAT DESA GUNAWAN

Nama (Inisial) : PO

Alamat : Jl. KM. 9 RT. 1 Desa Gunawan

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Tanggal wawancara : 12 Mei 2016

1. Bagaimana pendapat bapak mengenai pengelolaan sampah oleh Pemda Tana Tidung saat ini?
   Karena di sini tidak ada bak sampah, kendaraan dan petugas sampah masih jauh untuk dijangkau. Mau tidak mau, sampahnya kami kumpul untuk nanti dibakar.

2. Sudah puaskah bapak dengan pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh Pemda Tana Tidung saat ini?
   Saya tidak merasakan secara langsung pelayanan tersebut.

3. Apa saran dan masukan yang ingin bapak sampaikan terkait pengelolaan sampah di Kecamatan Sesayap?
   Tolong desa kami diperhatikan juga. Jangan yang dekat dengan pusat pemerintahan saja yang diurus.

Lampiran 2 Foto-foto

TPS di Desa Tideng Pale

TPS di Desa Tideng Pale Timur

TPS di Desa Sebidai

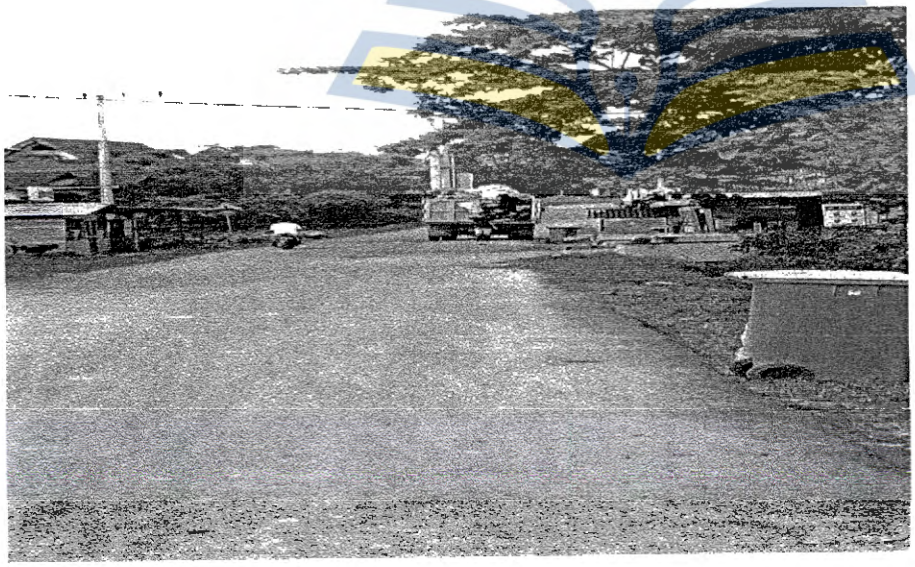

Pengambilan sampah di TPS

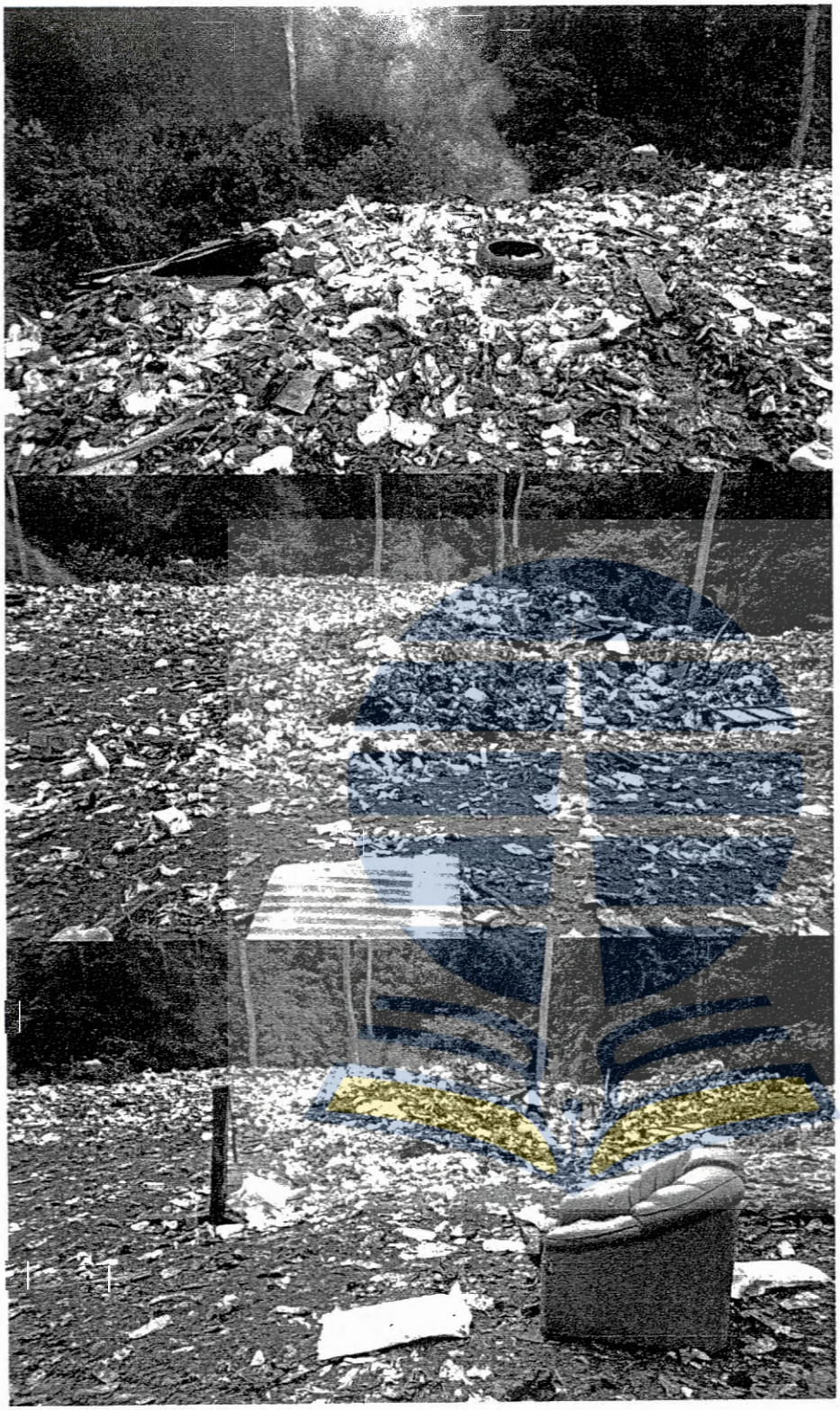

TPA yang digunakan saat ini

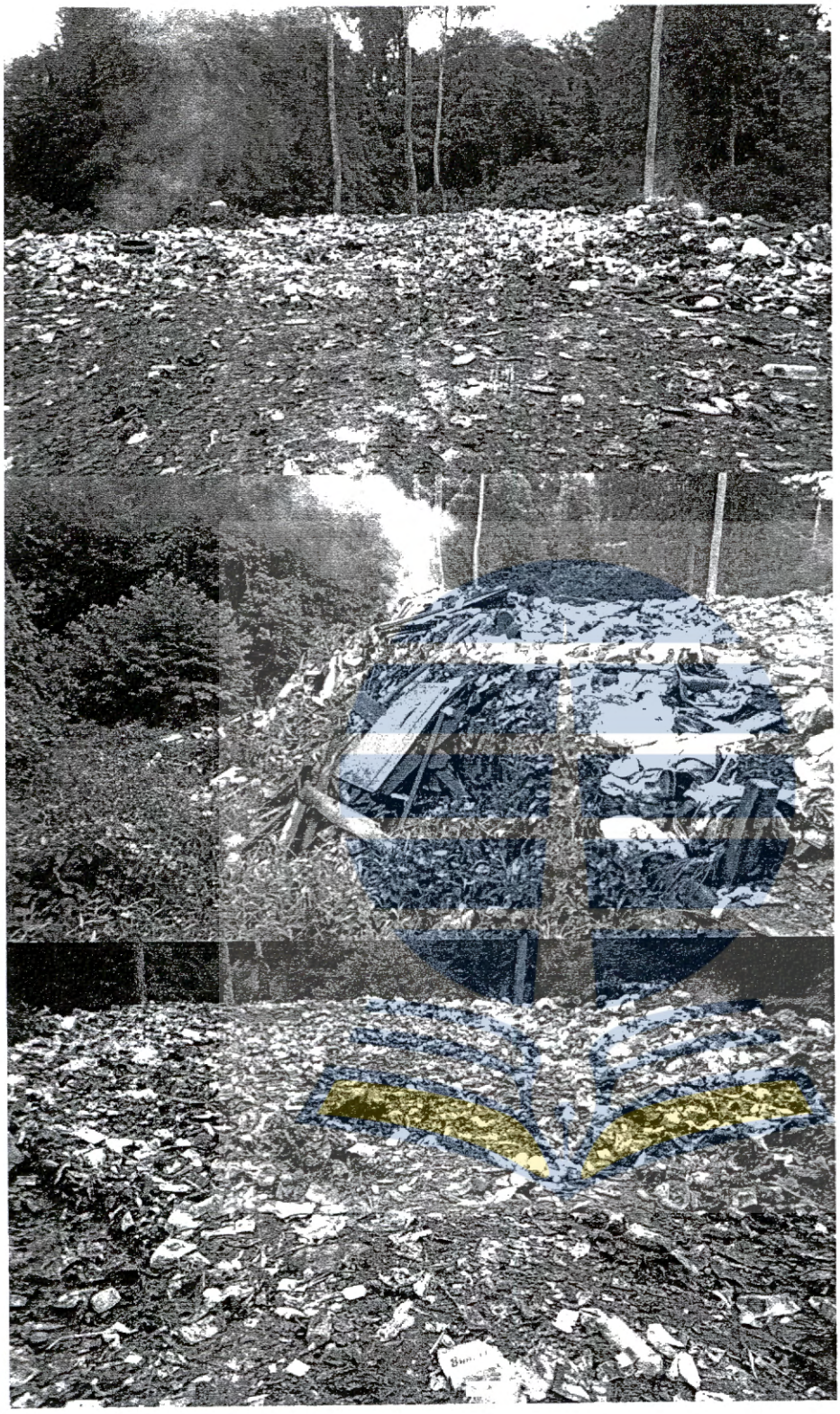

TPA yang digunakan saat ini

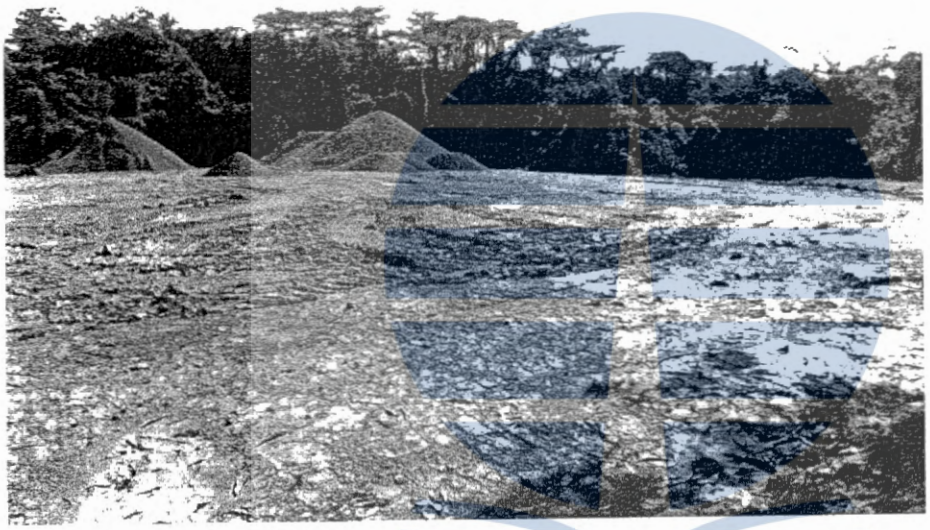

Lokasi Pembangunan TPA

Lampiran 3 Contoh SOP Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

PENGELOLAAN SAMPAH RUMAH TANGGA			
Standar Operasional Prosedur	**Nomor Dokumen**	**Nomor Revisi**	**Halaman 1 dari 1**
	Tanggal Terbit	**Ditetapkan di Tideng Pale Kepala Dinas PU dan Perhubungan (NIP.....)**	
Pengertian	Sampah rumah tangga sebagai sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik (sampah yang mengandung bahan beracun), yang dapat dimanfaatkan kembali apabila ada teknologinya		
Tujuan	Memastikan kegiatan pengelolaan sampah dilakukan sesuai dengan program kesehatan lingkungan yaitu tidak membahayakan terhadap lingkungan dan manusia.		
Kebijakan	Masyarakat penghasil sampah rumah tangga bersama dengan instansi terkait memantau pelaksanaan pengelolaan sampah		
Prosedur	1. *Stakeholder* penghasil sampah rumah tangga malakukan pembuangan sampah pada TPS-TPS yang telah disediakan 2. Petugas melakukan pemilahan antara sampah organik dan sampah non-organik sebelum dibuang ke TPA 3. Petugas pengangkut sampah melakukan pengangkutan menggunakan kendaraan pengangkut dan membawa ke tempat pembuangan akhir (TPA) minimal 2 (dua) kali sehari		
UNIT TERKAIT	Dinas Pekerjaan Umum dan Perhubungan Kabupaten Tana Tidung		
DOKUMEN TERKAIT	1. Laporan Pelaksanaan Tugas Harian 2. Laporan Pelaksanaan Tugas Mingguan 3. Laporan Pelaksanaan Tugas Bulanan 4. Laporan Evaluasi Pelaksanaan Tugas		